



Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Biro Perencanaan dan Organisasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

TRIWULAN 3

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2025



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan III Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, sekaligus menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan agenda reformasi yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Reformasi Birokrasi selama Triwulan III Tahun 2025, yang mencakup aspek-aspek tata kelola pemerintahan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh unit kerja. Oleh karena itu, hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mempercepat pelaksanaan reformasi, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung tercapainya target Reformasi Birokrasi yang lebih optimal ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, 30 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Tim Pengelola RB

Dewi Pusporini, S.T., M.E.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
Laporan Pelaksanaan General Triwulan III Tahun 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI	
A. Progres Capaian Rencana Aksi RB General dan Indikator RB General Triwulan III Tahun 2025	3
1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi.....	2
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	5
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	6
a. Indeks SPBE	6
b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE.....	10
4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi.....	12
a. Indeks Perencanaan Pembangunan.....	12
b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	15
5. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	20
6. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	21
7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	26
8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas	28
9. Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan	30
10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	32
11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	37
12. Pelaksanaan Data Statistik Sektor: Indeks Pembangunan Statistik	39
13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	44
14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.....	47
a. Opini BPK.....	47
b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.....	49
c. Indikator Pelaksanaan IKPA.....	51
d. Indeks Pengelolaan Aset	53
15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai, dan Jabatan Fungsional.....	56
16. Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	57
17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	59
a. Survey Kepuasan Masyarakat	59
b. Indeks Pelayanan Publik.....	61

Laporan Pelaksanaan RB Tematik Triwulan III Tahun 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI	63
A. Progres Capaian Sasaran Tematik dan Indikator Sasaran Tematik Triwulan III Tahun 2025	64
1. Pengentasan Kemiskinan	64
2. Peningkatan Investasi	66
3. Hilirisasi	67
4. Ketahanan Pangan Nasional	68
5. Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	70
6. Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	72
Laporan Hasil Evaluasi Internal Pelaksanaan RB Tahun 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI	74
A. Ketercapaian Target-Target Rencana Aksi	74
B. Kualitas Kegiatan terhadap Ekspektasi Rencana Rb	78
C. Kualitas Manajemen dalam Pelaksanaan RB	80
D. Rekomendasi Evaluasi RB <i>On-Going</i> General Triwulan III	82
E. Evaluasi RB <i>On-Going</i> Tematik Triwulan III	84
F. Rekomendasi Evaluasi RB <i>On-Going</i> Tematik Triwulan III	85
Penutup	86
A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Rapat Pembahasan Penambahan Layanan pada Aplikasi STELA	8
Gambar 1.2 Konsultasi Penyusunan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsuarji, M.A.P., bersama badan keahlian	14
Gambar 1.3 Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI terkait Pendalaman atas Pembahasan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029	14
Gambar 1.4 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I TA 2025	48
Gambar 1.5 Penilaian PIPK di Wisma Kopo.....	49
Gambar 1.6 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	50

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan agenda nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Sebagai *supporting system* dari lembaga legislatif, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan oleh DPR RI. Untuk itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi langkah penting dalam memastikan tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Dalam rangka mendorong capaian Reformasi Birokrasi secara terukur dan berkelanjutan, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi alat untuk menilai progres, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kerja yang mendukung Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi. Maka, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses implementasi program-program Reformasi Birokrasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga menjadi instrumen pengawasan internal yang penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa hingga Triwulan III Tahun 2025, *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional terbaru belum secara resmi diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Arah strategis dan acuan teknis bagi instansi pemerintah pada masa transisi ini kemudian ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 yang menekankan pada pentingnya penguatan perencanaan dan penilaian kinerja berbasis hasil (*outcome*).

Mengacu pada Surat Edaran tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan kegiatan evaluasi *ex-ante* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai langkah awal untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025, agar lebih selaras dengan fokus area perubahan yang ditetapkan pemerintah serta kebutuhan strategis organisasi. Langkah perbaikan ini mencakup penajaman indikator keberhasilan, penguatan mekanisme monitoring internal, serta penyelarasan program lintas unit kerja untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Melalui laporan ini, diharapkan tersedia data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan agenda reformasi, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya dokumentasi dan akuntabilitas atas langkah-langkah strategis dalam mendukung transformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024;
6. Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB Triwulan III Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memonitor pelaksanaan rencana aksi Triwulan III Tahun 2025 pada setiap indikator kegiatan utama RB di Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Menentukan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI guna meningkatkan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI.

LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TRIWULAN III TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Reformasi Birokrasi (RB) General difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar, khususnya perbaikan sistem dan tata kelola internal di lingkungan instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General dimaksudkan agar pencapaian target strategis Reformasi Birokrasi dapat lebih terarah dan dipercepat secara menyeluruh. Pada level instansi atau mikro, pelaksanaan RB mencakup penerapan kebijakan dan program RB yang telah dirumuskan pada tingkat makro dan meso, serta pelaksanaan inovasi RB yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang penajaman *Road Map* RB Nasional, penilaian RB kini mencakup dua komponen utama: RB General dan RB Tematik. RB General di Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kegiatan Utama. Bersamaan dengan itu, RB Tematik difokuskan pada 6 (enam) tema utama yang mendukung sasaran Pembangunan Nasional sesuai dengan Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 6 Tahun 2025. Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan III Tahun 2025.

A. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL DAN INDIKATOR RB GENERAL TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	26,98	26,98	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyampaian Usulan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Birokrasi Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Surat Usulan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Birokrasi Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Jawaban atas Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Kajian Penyederhanaan Birokrasi	Penyusunan Kajian Penyederhanaan Birokrasi	-	-	1	-	Rp. 84.562.000	Telah terlaksana
Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Penyederhanaan Birokrasi	Laporan Penyederhanaan Birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun, pada triwulan III dilaksanakan kegiatan terkait penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi. Kajian tersebut berisi tentang urgensi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tidak melakukan penyederhanaan birokrasi karena keunikan karakteristik organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, baik dari sisi kedudukan maupun fungsi.

Secara kedudukan, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki kedudukan sebagai perangkat pendukung lembaga legislatif konstitusional. Berbeda dengan kementerian negara yang diatur dalam Undang- Sekretariat Jenderal Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, kedudukan Setjen DPR RI diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020. Dengan dasar hukum tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dapat diperlakukan sama dengan kementerian atau lembaga eksekutif dalam hal penataan organisasi.

Dari sisi fungsi, Sekretariat Jenderal DPR RI sepenuhnya berorientasi pada *service delivery* internal yang meliputi dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian. Tidak ada fungsi *policy making* yang melekat, karena fungsi penyusunan kebijakan berada di tangan DPR RI sebagai lembaga legislatif. Namun, pekerjaan Sekretariat Jenderal DPR RI bersifat sangat koordinatif, baik secara internal dengan alat kelengkapan DPR RI, maupun secara horizontal dengan lembaga negara lain. Koordinasi ini mutlak diperlukan agar fungsi konstitusional DPR RI tidak terganggu. Anomali muncul karena meskipun Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan fungsi *service delivery*, nomenklatur yang digunakan adalah Deputy, bukan Direktorat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki corak kelembagaan yang berbeda dari kementerian teknis.

Dengan demikian, urgensi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tidak melakukan penyederhanaan birokrasi didasarkan pada:

1. Dasar hukum yang berbeda dengan kementerian;
2. Nomenklatur organisasi yang unik;

3. Dampak negatif yang terbukti secara empiris bila penyederhanaan dipaksakan;
4. Fungsi *service delivery* internal yang bersifat koordinatif.

Anggaran yang dialokasikan untuk rencana aksi indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah Rp84.562.000,00. Realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 80.062.000,00, atau 94,67%, digunakan untuk kegiatan rapat dan diskusi dengan narasumber.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/PSKj4Pe57qjD9eL>

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4	4	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 61.760.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Integrasi Implementasi Sistem Kerja Baru ke dalam Sistem Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI	Tangkapan layar Aplikasi Tim Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Sosialisasi Sistem Kerja Baru	Laporan Sosialisasi Implementasi Sistem Kerja Baru	-	-	-	1	Rp. 32.200.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Monitoring dan Evaluasi SOP	Hasil Monitoring dan Evaluasi SOP terutama SOP-SOP yang	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	berkaitan dengan Sistem Kerja Baru						
Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja Baru	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja Baru	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Sistem Kerja Baru	Laporan Sistem Kerja Baru	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada indikator kegiatan Pelaksanaan Sistem Kerja Baru, pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan pada Triwulan I, II, dan IV. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan III.

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:

a. Indeks SPBE

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4,23	4,23	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis BPMN	Tersusunnya Peta Proses Bisnis berbasis BPMN	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan TIK	Pengembangan Aplikasi Penerapan Manajemen Perubahan Layanan TIK	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal	Terlaksananya Laporan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Peningkatan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Penambahan Modul SPEKTRO+ pada Aplikasi DigitAll	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	Terlaksananya Evaluasi Dashboard SPBE DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada Triwulan III Tahun 2025, kegiatan penyusunan Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis Business Process Model and Notation (BPMN) telah mencapai tahap penyelesaian dengan selesainya penyusunan BPMN untuk seluruh proses bisnis yang tercakup dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) versi 2. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi, validasi model, dan penyesuaian antar domain arsitektur SPBE. Setiap BPMN menggambarkan alur kerja, peran aktor, dan titik kendali proses layanan digital secara sistematis, sehingga menjadi dasar bagi integrasi antar unit serta peningkatan efisiensi dan akuntabilitas proses di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selanjutnya, telah dilaksanakan pula kegiatan Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan TIK difokuskan pada penguatan mekanisme perubahan layanan secara terstruktur melalui pengembangan lanjutan aplikasi STELA (Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan) dan penyesuaian terhadap standar mutu layanan berbasiskan ISO 20000-1:2018. Setelah pada Triwulan II diperoleh sertifikasi ISO sebagai pengakuan formal atas penerapan manajemen layanan jaringan komputer, pada periode ini Pusat Teknologi Informasi melakukan langkah penyempurnaan dengan menambahkan tiga jenis layanan baru, yaitu Layanan Pembangunan Aplikasi (ITSM-4), Layanan Pengembangan Aplikasi (ITSM-5), dan Layanan Gangguan Aplikasi (ITSM-6). Penambahan ini menjadi bagian dari implementasi manajemen perubahan yang memperluas cakupan layanan dari sisi aplikasi sekaligus meningkatkan kejelasan kategori tiket, alur persetujuan, serta pelacakan progres permohonan antar unit.

Selain itu, telah dilakukan rapat pembahasan teknis bersama Bidang Tata Kelola TI (TKTI) dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur TI (SIINTI) untuk memastikan setiap perubahan yang diusulkan memenuhi ketentuan Request for Change (RFC) dan terdokumentasi sesuai pedoman ISO 20000 serta Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 58/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Manajemen Layanan TI. Penerapan manajemen perubahan ini juga didukung oleh pembuatan formulir resmi Permintaan Penambahan Layanan serta penyusunan dokumentasi pendukung yang terintegrasi dengan portal STELA. Dengan terlaksananya pengembangan fitur dan perluasan layanan ini, STELA kini berfungsi tidak hanya sebagai sistem tiket insiden, tetapi juga sebagai *platform* kendali perubahan layanan TIK yang adaptif, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.



Gambar 1.1 Rapat Pembahasan Penambahan Layanan pada Aplikasi STELA

Kemudian, rencana aksi Pelaksanaan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal juga telah terlaksana secara komprehensif sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola dan keamanan layanan digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Audit ini dilaksanakan oleh lembaga independen LATIK (Lembaga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi) berdasarkan Surat Tugas Audit dari LATIK, bekerja sama dengan Tim Internal Pusat Teknologi Informasi. Pelaksanaan audit mencakup tiga lingkup utama, yaitu Audit Aplikasi SPBE, Audit Infrastruktur SPBE, dan Audit Keamanan SPBE, yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi, serta kesiapan sistem dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas SPBE secara menyeluruh.

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan penyusunan dan penetapan Audit Plan yang berisi ruang lingkup, metodologi, serta jadwal pelaksanaan kegiatan audit. Selanjutnya, Tim Auditor melakukan pemeriksaan lapangan, wawancara teknis, dan penelusuran dokumen pendukung terhadap layanan, aplikasi, dan infrastruktur yang dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi. Hasil audit kemudian dituangkan dalam tiga laporan utama—Laporan Audit Aplikasi SPBE, Laporan Audit Infrastruktur SPBE, dan Laporan Audit Keamanan SPBE—yang masing-masing memuat temuan, tingkat risiko, serta rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan pengendalian internal dan mitigasi risiko keamanan sistem.

Secara umum, hasil audit menunjukkan bahwa penerapan manajemen layanan TIK telah berjalan sesuai dengan prinsip good IT governance, khususnya pada aspek manajemen insiden, pengelolaan jaringan, dan kontrol akses. Namun demikian, auditor juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pada area penguatan kebijakan keamanan aplikasi dan penerapan audit trail terpusat.

Selanjutnya, rencana aksi Peningkatan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi telah dilakukan pada tahap integrasi Aplikasi Penilaian Kinerja Organisasi SPEKTRO+ dengan platform DigitAll yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Integrasi Aplikasi Penilaian Kinerja SPEKTRO+ ke DigitAll pada tanggal 25 Juli 2025 yang dihadiri oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB), serta Pusat Teknologi Informasi. Pembahasan difokuskan pada penguatan pemanfaatan aplikasi SPEKTRO+ untuk mendukung sistem penilaian kinerja organisasi secara digital melalui *dashboard* PKO

(Pengelolaan Kinerja Organisasi), yang menampilkan capaian kinerja, serapan anggaran, dan hasil evaluasi berbasis data terintegrasi.

Pengembangan aplikasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mengimplementasikan 4 (empat) komponen utama SAKIP, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja—serta menambahkan fungsi konektivitas antara modul perencanaan kinerja dan modul penarikan dana. Pada periode ini juga telah dilakukan implementasi awal integrasi modul SPEKTRO+ ke dalam aplikasi DigitAll, yang ditunjukkan melalui tampilan antarmuka modul akuntabilitas kinerja pada sistem tersebut. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data capaian kinerja organisasi secara otomatis, memperkuat akuntabilitas pelaporan, serta meningkatkan efisiensi monitoring capaian program di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kemudian sehubungan dengan rencana aksi Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan Pusat Teknologi Informasi telah melaksanakan Rapat Evaluasi Pengembangan Portal SPBE untuk Manajemen Pengetahuan pada tanggal 8 September 2025, yang membahas kesesuaian pengelolaan portal spbe.dpr.go.id dengan ketentuan dalam Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Manajemen Pengetahuan SPBE. Hasil rapat merekomendasikan perlunya penyelarasan kebijakan dan pengembangan fitur portal agar mendukung dokumentasi, berbagi pengetahuan, dan repositori internal yang terintegrasi, dengan pembelajaran dari praktik baik portal simpan.brin.go.id.

Sebagai tindak lanjut, telah disusun Laporan Evaluasi Manajemen Pengetahuan SPBE DPR RI yang menilai posisi kematangan pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan indikator nasional, dengan kekuatan utama pada aspek kebijakan dan indikator SPBE, serta area penguatan pada struktur pengelola, kanal berbagi, dan mekanisme evaluasi kematangan berkelanjutan. Laporan ini juga memuat rekomendasi strategis mencakup integrasi portal dengan sistem layanan (*helpdesk/insiden*), penguatan budaya berbagi antarunit, serta kolaborasi eksternal dengan SIMP@N BRIN untuk mendorong peningkatan menuju Level 4 (Terpadu & Terukur).

Pada Triwulan III Tahun 2025, pengelolaan anggaran Rencana Aksi RB General Indeks SPBE difokuskan pada optimalisasi sumber daya internal dan realisasi kegiatan strategis yang telah direncanakan. Dua kegiatan utama, yaitu penyusunan arsitektur domain proses bisnis berbasis BPMN serta penerapan manajemen perubahan layanan TIK melalui aplikasi STELA, tetap dilaksanakan tanpa memerlukan tambahan biaya (Rp. 0) karena ditangani sepenuhnya oleh Tim Teknis Internal. Sementara itu, alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kegiatan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal yang sebelumnya masih dalam proses penyesuaian, pada periode ini telah disetujui melalui revisi anggaran dan mulai direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan audit oleh pihak eksternal.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/kGBrXTEJ5nQJAYc>

b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	3	4	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI	Tersusunnya Kebijakan Arsitektur SPBE dan disosialisasikan kepada unit kerja terkait	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027	Pemutakhiran Arsitektur SPBE To-Be pada SIA SPBE V2	1	1	1	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi	Tersusunnya Kebijakan Standar Manajemen Data	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan <i>Clearance</i> Arsitektur SPBE DPR RI	Terlaksananya proses <i>clearance</i> terintegrasi antara SIA SPBE dengan aplikasi SIEGA	-	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI telah terlaksana dengan fokus utama kegiatan diarahkan pada tahap finalisasi dan legalisasi dokumen kebijakan, setelah melalui proses pemutakhiran artefak arsitektur SPBE dalam sistem SIA SPBE versi 2. Pemutakhiran ini diperlukan agar substansi dokumen kebijakan dan peta rencana arsitektur mencerminkan kondisi aktual sistem, domain, serta keterkaitan antar komponen arsitektur SPBE di lingkungan DPR RI.

Proses pemutakhiran arsitektur yang berlangsung hingga akhir September 2025 menyebabkan tahapan penyusunan dan finalisasi dokumen Laporan Arsitektur dapat diselesaikan secara penuh pada tanggal 30 September 2025. Meskipun demikian, seluruh target dokumen kebijakan berhasil ditetapkan melalui 2 (dua) keputusan penting, yaitu Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1820/SEKJEN/2025 tentang Penetapan Peta Rencana SPBE Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025–2027 yang ditetapkan pada 6 Mei 2025, serta Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3904/SEKJEN/2025 tentang Penetapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditetapkan pada 30 September 2025.

Dengan terbitnya kedua surat keputusan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah memiliki landasan hukum dan arah kebijakan resmi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan SPBE yang terintegrasi. Namun, mengingat dokumen Laporan Penyusunan Arsitektur diselesaikan pada akhir triwulan, maka proses sosialisasi kepada unit kerja terkait akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari implementasi kebijakan dan diseminasi hasil penyusunan arsitektur SPBE.

Selanjutnya, rencana aksi Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027 telah terlaksana dengan fokus pada pemutakhiran artefak Arsitektur SPBE To-Be pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) versi 2, serta penyusunan dokumen laporan komprehensif yang menggambarkan keterkaitan antar domain arsitektur — meliputi proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Pemutakhiran ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rancangan arsitektur dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga setiap komponen arsitektur mendukung efisiensi, interoperabilitas, dan kesinambungan transformasi digital di lembaga.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Rapat Pemutakhiran Arsitektur SPBE DPR RI dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025, dengan melibatkan Tim Teknis dan perwakilan unit kerja terkait. Rapat ini membahas hasil analisis dan pemetaan ulang artefak arsitektur, termasuk penyelarasan domain proses bisnis, data, dan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan aktual organisasi serta *Road Map* Implementasi RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil pembahasan tersebut kemudian diimplementasikan langsung ke dalam sistem SIA SPBE V2, yang menampilkan keterhubungan antar domain dalam bentuk arsitektur To-Be yang lebih komprehensif dan terdigitalisasi.

Sebagai hasil akhir, Dokumen Laporan Penyusunan Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPR RI telah disusun dan memuat keseluruhan hasil pemutakhiran Arsitektur To-Be, termasuk model konseptual, keterkaitan antar domain, serta rencana penerapan dan pengendalian implementasi SPBE. Selain itu, metadata Arsitektur To-Be Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah diperbarui untuk memastikan keterlacakan dan konsistensi artefak arsitektur yang dikelola pada platform SIA SPBE. Metadata ini mencerminkan struktur dan hubungan antar komponen arsitektur yang digunakan sebagai referensi teknis dalam pengembangan sistem dan integrasi data lintas unit.

Kemudian rencana aksi Pelaksanaan *Clearance* Arsitektur SPBE DPR RI telah terlaksana dengan fokus kegiatan yang diarahkan pada tahap persiapan pelaksanaan *clearance*, yaitu dengan melakukan pemetaan dan penginputan nama-nama kegiatan SPBE yang akan dilakukan proses *clearance* ke dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE V2). Langkah ini bertujuan agar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi, infrastruktur, maupun pengelolaan data dapat terdaftar dalam sistem arsitektur dan secara otomatis dapat ditarik ke Sistem Informasi Evaluasi Anggaran SPBE (SIEGA SPBE) pada saat proses *clearance* dilakukan.

Proses penginputan kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam integrasi antara SIA SPBE dan SIEGA SPBE. Melalui mekanisme tersebut, sistem dapat menampilkan daftar kegiatan SPBE yang telah terverifikasi arsitekturnya, sehingga ketika dilakukan pelaksanaan *clearance* menggunakan SIEGA SPBE, proses validasi akan berlangsung lebih efisien, terarah, dan terdokumentasi secara digital.

Kegiatan ini juga menjadi implementasi awal penerapan prinsip *governance by architecture*, dimana setiap perencanaan belanja dan program TIK mengacu langsung pada peta rencana serta kebijakan Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan langkah ini, Pusat Teknologi Informasi memastikan bahwa seluruh inisiatif digital yang diusulkan oleh unit kerja telah sesuai dengan domain arsitektur yang berlaku, menghindari duplikasi sistem, serta

mendukung interoperabilitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya TIK di lingkungan DPR RI.

Kegiatan yang menggunakan dukungan anggaran khusus adalah penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai Rencana Induk TIK (RITIK) 2025–2027, dengan alokasi sebesar Rp.100.000.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan teknis pemutakhiran artefak arsitektur, konsultasi dan validasi hasil pemodelan, serta penyesuaian struktur arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) versi terbaru agar sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan internal DPR RI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2pKAW2rkoFdqor>

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi:

a. Indeks Perencanaan Pembangunan

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	94,42	94,5	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Konsistensi Rencana Kerja K/L terhadap Rencana Strategis K/L	Tersusunnya Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029	-	-	1	-	Rp. 47.300.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Rencana Kerja DPR RI TA 2025	1	-	-	-	Rp. 615.342.000	Telah terlaksana
	Pelaksanaan Dokumen Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Strategis dengan Rencana Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Kesesuaian Pagu Anggaran RKA K/L dengan Pagu Anggaran Rencana Kerja K/L	Pelaksanaan Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKA K/L TA 2025	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Penyusunan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan. Dalam menyusun Rencana Strategis DPR RI, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti evaluasi kinerja DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukungnya, serta wawancara dan diskusi dengan pakar maupun akademisi untuk mendapatkan pandangan dan

masukannya terkait capaian DPR RI sepanjang 2020-2024, termasuk dengan Anggota DPR RI Periode 2020-2024. Dalam rangka menguatkan Rencana Strategis DPR RI, juga telah dilakukan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai Kementerian terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, maupun BPS. Proses keseluruhan penyusunan Rencana Strategis DPR RI telah berjalan sejak November 2023 sampai dengan Mei 2025. Artinya penyusunan Rancangan Rencana Strategis DPR RI telah dilakukan secara simultan dan sejalan dengan pembahasan Rancangan UU tentang RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan RPJMN 2025-2029. Akhirnya, pasca dibentuknya Panja Rencana Strategis DPR RI di BURT pada 4 Desember 2024, Rancangan Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 mulai dibahas dalam Rapat Panja BURT pada 4 Februari 2025.

Kemudian, setelah melalui beberapa kali pembahasan dalam Panja BURT, Rapat Pleno BURT pada 21 Mei 2025 memutuskan menerima Laporan Panja BURT tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029. Dalam masa pembahasan tersebut, BURT juga telah mengirimkan surat maupun melakukan konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan penetapan payung hukum Rencana Strategis DPR RI 2025-2029. Mengingat materi pengaturan dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa "Kementerian/Lembaga menetapkan Rancangan Renstra K/L menjadi Renstra K/L dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga paling lambat 5 (lima) bulan setelah RPJMN diundangkan". Artinya *deadline* penetapan Rencana Strategis K/L adalah tanggal 10 Juli 2025, karena Peraturan Presiden tentang RPJMN 2025-2029 baru diundangkan pada 10 Februari 2025.

Selanjutnya, telah diselenggarakan Rapat Pimpinan DPR RI pada 26 Mei 2025 yang memutuskan bahwa menugaskan pembahasan terkait payung hukum Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 akan dilaksanakan oleh salah satu Pimpinan DPR RI, yaitu Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. bersama Badan Keahlian DPR RI. Telah dilakukan juga beberapa kali konsultasi kepada Pimpinan DPR RI, baik terkait dengan Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 maupun payung hukum Rencana Strategis DPR RI.

Setelah dilakukan penyempurnaan menindaklanjuti masukan Pimpinan DPR RI, dilakukan kembali Rapat Pimpinan DPR RI pada tanggal 30 Juni 2025 yang menetapkan bahwa payung hukum Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 adalah Peraturan DPR RI, dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, dan diharapkan sudah dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI berikutnya, yaitu tanggal 8 Juli 2025. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selanjutnya, dilakukan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 30 Juni 2025 yang memutuskan untuk mendengarkan pandangan fraksi terkait Rencana Strategis DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juli 2025. Setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi yang seluruhnya menyampaikan dukungan terhadap Rencana Strategis DPR RI 2025-2029, Paripurna DPR RI menyepakati bahwa payung hukum Rencana Strategis DPR RI adalah Peraturan DPR RI untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Legislatif. Dengan demikian, dokumen Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025 masih dalam proses pembentukan payung hukum Rencana Strategis DPR RI yang selanjutnya akan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juli 2025.



Gambar 1.2 Konsultasi Penyusunan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. bersama Badan Keahlian DPR RI

Kemudian, melalui Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI terkait Pembahasan Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 tanggal 4 dan 7 Juli 2025, Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR 2025-2029 untuk dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disahkan. Kesepakatan itu dicapai setelah mendengarkan pendapat fraksi yang secara bulat menerima rancangan Peraturan DPR RI tersebut untuk diproses ke tahap selanjutnya.



Gambar 1.3 Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI terkait Pendalaman atas Pembahasan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil pembahasan dan persetujuan dalam Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI tersebut, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025–2029 telah resmi ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2025 melalui Rapat Paripurna DPR RI. Penetapan peraturan ini menandai komitmen DPR RI dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen Rencana Strategis ini menjadi landasan strategis bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPR RI dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode 2025–2029 agar sejalan dengan arah dan prioritas Pembangunan Nasional.

Namun, berdasarkan dinamika politik yang berkembang serta hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Badan Anggaran terkait acara Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 tanggal 18 September 2025, telah ditetapkan pembagian Anggaran DPR RI Tahun 2026 ke dalam 2 (dua) Bagian Anggaran (BA), yaitu BA Dewan dan BA Sekretariat Jenderal. Sehingga, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis DPR RI dan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dimaksudkan agar arah kebijakan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI tetap selaras dengan perkembangan situasi politik, kebutuhan kelembagaan, serta tantangan nasional yang terus berubah. Dengan demikian, Rencana Strategis Tahun 2025–2029 tersebut diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang adaptif, responsif, dan relevan dengan dinamika lingkungan strategis saat ini maupun ke depan.

Rencana aksi Sinkronisasi/Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKA K/L TA 2025 juga telah dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, baik dari sisi sasaran, indikator, maupun alokasi pagu anggaran.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/eMrWg5LAsTcYLaT>

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	68,92	80	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Rencana Strategis DPR RI 2025 - 2029	Tersedianya Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025 - 2029 pasca Penetapan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 dalam bentuk dokumen final dan terpublikasi	-	-	1	-	Rp. 47.300.400	Telah terlaksana
Penyusunan Penjenjangan	Tersedianya Dokumen	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Penjenjangan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI						
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2025	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI pra-penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 yang telah disahkan Pimpinan unit kerja dan terdokumentasi resmi	26	-	-	-	Rp. 16.415.000	Telah terlaksana
	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II pasca Penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 yang telah disahkan Pimpinan unit kerja dan terdokumentasi resmi	-	-	26	-	Rp. 49.245.000	Telah terlaksana
Penyusunan Rencana Aksi dengan penetapan target dan mencantumkan dikuantifikasi dan dapat diukur	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disahkan Pimpinan unit kerja dan terdokumentasi resmi	-	26	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi atas Perubahan Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disahkan Pimpinan	-	-	26	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	unit kerja dan terdokumentasi resmi						
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Organisasi yang andal	Tersedianya Dokumen Penetapan Pedoman Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi	-	-	1	-	Rp. 6.699.000	Telah terlaksana
	Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja Organisasi	1	-	-	-	Rp.100.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan unit kerja yang telah disahkan Pimpinan unit kerja dan terdokumentasi resmi	1	1	1	1	Rp. 64.200.000	Telah terlaksana
Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan dan <i>Punishment</i> Pegawai	-	-	-	1	Rp. 5.670.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Terselenggaranya Sosialisasi Penghargaan dan <i>Punishment</i> Pegawai	-	-	-	1	Rp. 145.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014	Tersedianya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014	1	-	-	-	Rp. 99.230.000	Telah terlaksana
	Tersedianya Laporan Kinerja Deputi, Kepala Badan, dan Inspektur Utama, serta Eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014	25	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Evaluasi Internal atas Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Internal Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	26	-	Rp. 66.825.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Internal AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Internal Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	26	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi Penyusunan Rencana Strategis DPR RI 2025 – 2029 telah dilaksanakan dan disahkan melalui Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025. Dokumen tersebut merupakan gabungan atas Rencana Strategis Satker Dewan dan Satker Sekretariat Jenderal. Namun, dikarenakan dinamika arah kebijakan Pimpinan, maka kemudian terjadi pemisahan antara Rencana Strategis Dewan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029 telah disahkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025.

Rencana Strategis tersebut berfungsi sebagai arah kebijakan dan pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas serta fungsi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya, rencana aksi Penyusunan Penjenjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 telah terlaksana dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3860/SEKJEN/2025, tertanggal 23 September 2025. Kemudian rencana aksi Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2025 pun telah dilaksanakan. Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI pasca penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 telah ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sasaran strategis lembaga secara terukur, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta prioritas kelembagaan DPR RI.

Rencana aksi penyusunan dokumen Rencana Aksi atas Perubahan Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disahkan Pimpinan unit kerja dan terdokumentasi resmi telah dilaksanakan dan terdokumentasi secara resmi sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja yang lebih terarah dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lembaga.

Selanjutnya, rencana aksi penyusunan Dokumen Penetapan Pedoman Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi juga telah terlaksana melalui pengesahan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3578 Tahun 2025 tentang Penetapan Sistem Penilaian Kinerja Terintegrasi Organisasi Plus (SPEKTRO+) pada Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai landasan resmi dalam penerapan sistem manajemen kinerja berbasis digital yang terintegrasi, guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengukuran kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kemudian, rencana aksi Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja juga telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dengan terbitnya Surat Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Triwulan III bagi seluruh Eselon I dan Eselon II, dengan batas penyampaian hingga tanggal 8 Oktober 2025. Saat ini, Bagian PKORB masih melaksanakan proses asistensi dan verifikasi pengisian capaian kinerja Rencana Aksi Triwulan III bagi para Penanggung Jawab (PIC) SPEKTRO+ di masing-masing unit kerja, guna memastikan kesesuaian data capaian dengan target kinerja yang telah ditetapkan serta menjamin konsistensi pelaporan dalam sistem.

Bersamaan dengan itu, Inspektorat Utama telah melaksanakan evaluasi internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, mencakup seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II, dengan tujuan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan. Dengan begitu, rencana aksi Pelaksanaan Evaluasi Internal atas Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI telah terlaksana.

Kemudian, rencana aksi Pelaksanaan Monitoring Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Internal AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI telah tercapai. Capaian ini menunjukkan komitmen sebagian besar unit dalam menindaklanjuti hasil evaluasi

internal secara sistematis, sementara sisanya masih dalam proses penyusunan dan verifikasi untuk memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan secara optimal.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan SAKIP Tahun 2025, total kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 600.584.400,-. Anggaran tersebut bersumber langsung dari DIPA TA 2025 dan telah dialokasikan mulai dari Triwulan I hingga Triwulan IV, demi mencapai target SAKIP yang telah ditetapkan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/dpG3t6GBLXgzDbE>

5. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	0,75	0,75	Inspektorat I dan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, dan/atau Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan Pembangunan ZI Tahun 2025 pada 3 (tiga) unit kerja, yang memuat progres capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan strategi	1	1	1	1	Rp. 7.425.000	Telah terlaksana
Pembangunan dan Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI	Tersusunnya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI pada 3 (tiga) unit kerja Target Pembangunan ZI sesuai Peraturan Menteri PANRB/Peraturan yang berlaku	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN)	Surat Pengajuan 3 (tiga) unit kerja yang memenuhi syarat hasil evaluasi TPI untuk Penilaian WBK/WBBM oleh TPN sesuai Peraturan Menteri PANRB/Peraturan yang berlaku	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Selama Triwulan III Tahun 2025, Inspektorat Utama dan unit kerja yang sedang dalam Pembangunan Zona Integritas telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Zona Integritas, dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Pembangunan ZI Tahun 2025 pada 3 (tiga) unit kerja, yang memuat progres capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan strategi.

Sesuai dengan DIPA Inspektorat Utama TA 2025, jumlah anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi Zona Integritas adalah senilai Rp. 7.425.000. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pemenuhan target ZI selama Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/pmtELH5HMFafCRD>

6. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
BPKP	3,6	3,69	Inspektorat II

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara	SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana	-	2	2	-	Rp. 5.250.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
subtansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	pesertanya telah mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi SPIP; Laporan Pendampingan Penilaian Mandiri (PM); dan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (PK)						
Melakukan Reviu atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Melakukan Penyesuaian IKSS dalam Draft Teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029	Laporan Evaluasi atau Catatan Hasil Reviu dan Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melaksanakan Monitoring terhadap Pelaksanaan Penanganan Risiko melalui LPPR dan LMPR	LPPR dan LMPR dan dokumen pendukung yang membuktikan terdapat tindak pengendalian dalam menangani <i>residual risk</i>	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melaksanakan penyusunan PKPT Berbasis Risiko	PKPT Berbasis Risiko	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemantauan dan Tindak Lanjut atas Temuan BPK yang dilakukan per-semester	Dokumen terkait dengan Monitoring atas TLHP BPK RI	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Peta Jabatan Pegawai di Biro Persidangan I; Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai di Biro Persidangan I; <i>Road Map</i> Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI; Standar Kompetensi Jabatan;	Analisis Beban Kerja dan Jumlah SDM yang tersedia dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM yang mendukung persidangan DPR RI	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Dokumentasi/Laporan Singkat Biro Persidangan I dan Ortala dalam rangka perhitungan Analisis Beban Kerja							
Mengupayakan Integrasi dan Evaluasi berkala atas Sistem Informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan persidangan, termasuk mekanisme mentransmisikan data antar sistem informasi, menyusun prosedur dalam penyiapan laporan yang efisien, dan menyiapkan staf yang memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan sistem informasi tersebut	Dokumen pendukung yang terkait dengan pengintegrasian sistem informasi di Biro Persidangan I	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melaksanakan kegiatan Pengawasan atas jamuan di Sekretariat Jenderal DPR RI dan Melaksanakan kegiatan Pengawasan atas jamuan di Biro Kesekretariatan Pimpinan	Kegiatan pengawasan terkait dengan audit jamuan	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan koordinasi ke Bagian Administrasi Keuangan terkait dengan kegiatan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas	Peraturan/Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Berkas Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan koordinasi ke Bagian Admin BMN tentang monitoring terhadap tata kelola aset tak berwujud	Dokumen monitoring terhadap tata kelola aset tak berwujud	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Mendampingi LO, agar dalam menyusun <i>Risk Register</i> diupayakan ada Risiko Strategis sebagai dasar dalam penentuan indikator dan target kinerja di Perjanjian Kinerja	<i>Risk Register</i> dengan adanya kategori Risiko Strategis	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan <i>Risk Register</i> dan Laporan Evaluasi <i>Risk Register</i> dan Laporan Monitoring Penanganan Risiko	LPPR dan LMPR dan dokumen pendukung yang membuktikan terdapat tindak pengendalian dalam menangani <i>residual risk</i>	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	<i>Risk Register</i> dan Laporan Evaluasi <i>Risk Register</i> dan Laporan Monitoring Penanganan Risiko	1	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Program Pengembangan Mandiri (PPM) terkait Manajemen Risiko pada setiap unit kerja dan Mengikutsertakan Pejabat dan Pegawai dalam Diklat/Sertifikasi terkait Manajemen Risiko	Dokumentasi kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> tentang peran Manajemen Risiko dan Sertifikat kegiatan <i>Knowledge Sharing</i> atau PPM	-	2	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan Evaluasi pada Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 10 Tahun 2021 dengan kebijakan	Laporan Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2021 dan Revisi Peraturan Sekretaris	-	1	-	1	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
terkait integrasi Penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI; Menambahkan klausul bahwa Manajemen Risiko menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan organisasi) dan menginkorporasikan hasil Manajemen Risiko ke dalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan; dan Menambahkan penjelasan secara rinci tugas pokok dan fungsi pada lini ke dua	Jenderal Nomor 10 Tahun 2021						
Melakukan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Instansi dengan berkoordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi	Laporan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Risiko dan Screenshot perubahan di Sistem Informasi Manajemen Risiko	-	-	-	2	Rp. 0	Telah terlaksana
Menetapkan Evaluasi Manajemen Risiko dalam PKPT Tahun 2025	PKPT Inspektorat Utama Berbasis Risiko Tahun 2025	1	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana
Membuat Rekapitulasi mengenai Kebijakan dan SOP Anti Korupsi dan mengevaluasi Kebijakan serta SOP tersebut	Laporan Evaluasi SOP Anti Korupsi	1	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana
Menyusun Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan	Rencana Aksi Stranas PK dan Materi <i>Sharing</i>	2	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Mengikuti <i>Sharing Session</i> terkait Pengelolaan Benturan Kepentingan	<i>Session</i> Pengelolaan Benturan Kepentingan						
Melaksanakan Pendampingan dan Evaluasi <i>Risk Register</i> (khususnya terkait <i>fraud</i>) di unit Eselon I dan II; Optimalisasi Sosialisasi tentang Penggunaan Aplikasi WBS, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan; dan Pelaporan LHKAN dan LHKPN 100%	Laporan kegiatan Pengawasan terkait dengan Pendampingan dan Evaluasi <i>Risk Register</i> , Laporan Implementasi WBS, dan Laporan LHKPN dan LHKAN 100%	3	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana aksi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 telah terlaksana sebagaimana seluruh unit kerja Eselon II telah melakukan pengisian dan penyusunan eviden.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3AzkTWMgCfr6qXB>

7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	5	5	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembentukan Tim Pengelolaan	SK Tim Pengelolaan Pengaduan	1	-	-	-	Rp. 107.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR	Masyarakat ditetapkan dengan 50 (lima puluh) anggota yang mencakup unsur Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Pejabat Penghubung sebagai Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat						
Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR	-	1	-	-	Rp. 4.050.000	Telah terlaksana
Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan Kementerian/Lembaga terkait pengaduan	Laporan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pengaduan (teradu pengaduan masyarakat) Tahun 2025	-	-	-	1	Rp. 22.733.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Laporan Kegiatan dan Sertifikat FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1	-	-	-	Rp. 5.850.000	Telah terlaksana
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan Kegiatan dan Sertifikat Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	1	Rp. 51.600.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR dan Sidumas	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui	-	-	-	1	Rp. 4.050.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	SP4N LAPOR dan Sidumas						

Pada indikator kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR), pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan pada Triwulan I, II, dan IV. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan III.

8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	77,15	78	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan ZI Tahun 2025	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan Pembangunan ZI Tahun 2025 pada 3 (tiga) unit kerja, yang memuat progres capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan strategi	1	1	1	1	Rp. 7.425.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025, yang memuat progres capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan strategi	1	1	1	1	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Anti Corruption Week pada hari Anti Korupsi Dunia	Tersusunnya Laporan Kegiatan <i>Anti Corruption Week</i>	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Kegiatan Pemenuhan Data Responden Internal, Eksternal, dan Ekspert untuk pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025	Data Responden dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Evaluasi terkait Kebijakan dan SOP Anti Korupsi serta implementasinya	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kebijakan dan SOP Anti Korupsi serta implementasinya	-	1	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana aksi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan ZI Tahun 2025 telah terlaksana pada 3 (tiga) unit kerja, yang memuat progres capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan strategi. Bersamaan dengan itu, rencana aksi Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 pun telah terlaksana. Kegiatan tersebut menghasilkan Laporan Monitoring dan Evaluasi yang memuat progres capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan strategi.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi Pemenuhan Data Responden Internal, Eksternal, dan Ekspert untuk pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025 juga telah terlaksana.

Sesuai dengan DIPA Inspektorat Utama TA 2025, jumlah anggaran untuk Rencana Aksi SPI adalah senilai Rp. 17.325.000. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan SPI selama Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/wQp7GiZw4o2HNN7>

9. Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
LAN	-	85	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Mengikuti FGD Penjelasan Pengukuran IKK 2025	Dokumen FGD Penjelasan Pengukuran IKK 2025	-	-	1	-	Rp. 9.645.000	Telah terlaksana
Mendaftarkan SK tentang Pembentukan Tim Pengukuran IKK 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI	SK tentang Pembentukan Tim Pengukuran IKK 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Mengikuti Rapat Konsultasi Pemenuhan Data Dukung Pengukuran IKK 2025	Dokumen Rapat Konsultasi Pemenuhan Data Dukung Pengukuran IKK 2025	-	-	1	-	Rp. 7.725.000	Telah terlaksana
	Dokumen Rapat Konsultasi Pemenuhan Data Dukung Pengukuran IKK 2025	-	-	1	-	Rp. 9.345.000	Telah terlaksana
Menyusun Kertas Kerja Kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI Berbasis Elektronik melalui Portal Elektronik Register Informasi Terintegrasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI)	Tersusunnya Dokumen Kertas Kerja Kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI Berbasis Elektronik melalui Portal Elektronik Register Informasi Terintegrasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI)	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Kertas Kerja Kebijakan Digitalisasi	Tersusunnya Dokumen Kertas Kerja Kebijakan Digitalisasi Sistem	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Sistem Layanan Kesehatan (SIDILAN)	Layanan Kesehatan (SIDILAN)						
Menyusun Kertas Kerja Kebijakan Pemanfaatan Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics (AIRA) dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Kertas Kerja Kebijakan Pemanfaatan Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics (AIRA) dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Mengunggah Dokumen Kebijakan PERISAI, SIDILAN, dan AIRA dalam aplikasi IKK LAN	<i>Screenshot</i> tangkap layar Dokumen Kebijakan PERISAI, SIDILAN, dan AIRA dalam aplikasi IKK LAN	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Laporan Pelaksanaan Pengukuran IKK 2025	Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengukuran IKK 2025	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Mengikuti FGD Penjelasan Pengukuran IKK 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 di Ruang Rapat Biro Persidangan I dengan mengundang narasumber dan LAN. Kemudian, rencana aksi Mendaftarkan SK tentang Pembentukan Tim Pengukuran IKK 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI pun telah terlaksana dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3183/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 yang disahkan pada tanggal 11 Juli 2025.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi Mengikuti Rapat Konsultasi Pemenuhan Data Dukung Pengukuran IKK 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Ruang Rapat Biro Persidangan I dan pada tanggal 1 Agustus di Ruang Rapat Analisis Keparlemenan. Melalui kedua rapat tersebut, disimpulkan bahwa Tim IKK perlu membuat matriks kelengkapan data dukung dalam Google Drive untuk disebarkan kepada para unit pemilik kebijakan untuk mengunggah data dukung yang dibutuhkan. Setelah bukti dukung dipenuhi, maka penilaian IKK Sekretariat Jenderal DPR RI akan di unggah ke dalam aplikasi LAN.

Kemudian, rencana aksi Menyusun Kertas Kerja Kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI Berbasis Elektronik melalui Portal Elektronik Register Informasi Terintegrasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI), Menyusun Kertas Kerja Kebijakan Digitalisasi Sistem Layanan Kesehatan (SIDILAN), dan Menyusun Kertas Kerja Kebijakan Pemanfaatan Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics (AIRA) dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat telah

terlaksana. Setelah itu, rencana aksi Mengunggah Dokumen Kebijakan PERISAI, SIDILAN, dan AIRA dalam aplikasi IKK LAN pun telah dilaksanakan oleh Tim IKK.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/EW5QRjZqGXLCKZH>

10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Hukum dan HAM	100	100	Pusat Perancangan Undang-Undang

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyusun dan menyampaikan Surat Pernyataan terkait Variabel I IRH ke Kementerian Hukum	Penyusunan dan penyampaian Surat Pernyataan Variabel I IRH ke Kementerian Hukum	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun TOR terkait Pelatihan Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan	TOR Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	TOR Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra (FGD/Workshop/Seminar)	1	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 75.600.000	Telah terlaksana
	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra (FGD/Workshop/Seminar)	1	-	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Surat Keputusan dan Surat Tugas Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Laporan Hasil Kajian dan	Dokumen Daftar Undang-Undang	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi Undang-Undang	yang telah dilakukan evaluasi						
	Dokumen Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan serta Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	8	7	7	3	Rp. 273.985.000	Telah terlaksana
Mengirim Rekomendasi Hasil Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Bukti Pengiriman Rekomendasi Hasil Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang, termasuk Surat Pengantar, tanda terima dari AKD, atau bukti elektronik resmi pengiriman	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Dokumen Rekap Data Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang	Rekap Data Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, memuat informasi nama, jabatan, unit kerja, peran, periode keterlibatan sesuai format yang ditetapkan	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan pengumpulan Data Dukung Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	Hasil Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melaksanakan pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking</i> , <i>Konsinyering</i>)	Laporan Hasil <i>Benchmarking</i> Pengelolaan JDIH dan Laporan Hasil <i>Konsinyering</i> Pengembangan/ Pematkhiran JDIH	-	1	-	-	Rp. 25.080.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui kegiatan <i>Benchmarking</i> Pengelolaan JDIH dan Konsinyering Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem JDIH	Laporan Hasil Pengisian E-Report Pengembangan JDIH	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Membuat Abstrak Peraturan yang diunggah ke Website JDIH	Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Mengumpulkan <i>Capture</i> Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial	Kompilasi <i>screenshot</i> yang memuat Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Intetegrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, bukti	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	publikasi Media Sosial JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI						
Mengunggah konten resmi terkait Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (misalnya <i>update</i> koleksi peraturan, fitur baru, atau kegiatan JDIH) ke akun Instagram resmi JDIH, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun	Kompilasi <i>screenshot</i> unggahan di akun Instagram resmi JDIH	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Rekapitulasi Tahunan Data Produk Hukum yang telah diunggah di JDIH	Dokumentasi Hasil Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah di unggah di JDIH	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Selama Triwulan III Tahun 2025, PIC IRH telah melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham telah melaksanakan kegiatan Webinar dengan judul Urgensi dan Pokok-pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim pada tanggal 16 Juli 2025. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra kemudian melaksanakan Lokakarya dalam rangka peningkatan kualitas NA dan RUU yang memenuhi *Meaningful Public Participation* pada tanggal 25-26 Juli 2025. Bersamaan dengan itu, Badan Legislasi pun telah menyusun dan menyampaikan Surat Pernyataan terkait Variabel I IRH ke Kementerian Hukum.

Selanjutnya, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan:

- Penyusunan 1 (satu) Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- Penyusunan 1 (satu) Dokumen Daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi;
- Penyusunan 7 (tujuh) Dokumen Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan

- Pengiriman 1 (satu) Dokumen Rekomendasi Hasil Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke AKD;

Pada saat bersamaan, Biro Hukum telah melaksanakan:

- Penyusunan 1 (satu) abstrak peraturan yang diunggah ke *website* JDIH;
- Pengumpulan 1 (satu) *capture* metadata pengolahan dokumen hukum, URL integrasi, log sinkronisasi integrasi, dan media sosial; dan
- Pengunggahan 1 (satu) konten resmi terkait pengelolaan dan pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (misalnya *update* koleksi peraturan, fitur baru, atau kegiatan JDIH) ke akun Instagram resmi JDIH.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/tfALQoetSCNdktX>

11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
ANRI	98,09	98,10	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Kaset	Laporan Pemeliharaan Kaset, BAST	1	-	-	-	Rp. 199.800.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan CD/DVD	Laporan Pemeliharaan CD/DVD, BAST	1	-	-	-	Rp. 175.158.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>	Laporan Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i> , BAST	1	-	-	-	Rp. 140.415.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Cacah	Laporan Pemeliharaan Mesin Cacah, BAST	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Lemari Kaset	Laporan Pemeliharaan	1	-	-	-	Rp. 89.910.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Lemari Kaset, BAST						
Sewa Ruang Penyimpanan Boks Arsip	Surat Perjanjian Sewa Ruang Penyimpanan Boks Arsip	1	1	1	1	Rp. 626.229.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM melalui <i>Workshop/Bimtek/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)</i>	Laporan, Daftar Hadir, dan dokumentasi Pelaksanaan <i>Workshop/Bimtek/Seminar/FGD</i>	1	-	6	2	Rp. 204.900.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Persidangan	Laporan Penataan Arsip Persidangan, BAST	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Laporan Penataan Arsip Bidang Administrasi, BAST	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Keuangan	Laporan Penataan Arsip Bidang Keuangan, BAST	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Laporan Penataan Arsip Kepegawaian, BAST	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Barang/Jasa	Laporan Penataan Arsip Barang/Jasa, BAST	-	1	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Komisi	Laporan Penataan Kaset Komisi, BAST	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Badan	Laporan Penataan Kaset Badan, BAST	-	1	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penataan Kaset Legislasi	Laporan Penataan Kaset Legislasi, BAST	-	1	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Mini DV	Laporan Penataan MiniDV, BAST	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Kaset Persidangan I	Laporan Digitalisasi Kaset Persidangan I, BAST	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Kaset Panja	Laporan Digitalisasi Kaset Panja, BAST	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Kaset Fit dan Proper Test	Laporan Digitalisasi Kaset Fit dan Proper Test, BAST	-	-	1	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Mini DV	Laporan Digitalisasi MiniDV, BAST	-	1	-	-	Rp. 192.500.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Arsip Kepegawaian	Laporan Digitalisasi Arsip Kepegawaian, BAST	1	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Sosialisasi SRIKANDI	Laporan Sosialisasi SRIKANDI, Daftar Hadir	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelatihan dan Pendampingan SRIKANDI	Laporan Pelatihan dan Pendampingan SRIKANDI, Daftar Hadir	-	5	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Monev SRIKANDI	Laporan Monev SRIKANDI	-	-	-	1	Rp. 115.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Sewa Ruang Penyimpanan Boks Arsip telah dilaksanakan. Kegiatan Sewa Ruang Penyimpanan dilaksanakan karena kapasitas *Record Center* yang dimiliki oleh Bagian Arsip tidak dapat menampung arsip seluruhnya, sehingga diperlukan penambahan Ruang

Penyimpanan Arsip. Adapun hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya arsip yang telah dipindahkan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Bagian Arsip untuk kemudian dilakukan pengelolaan dan perawatan arsip, agar arsip tetap terjaga baik fisik dan informasinya.

Selanjutnya, rencana aksi Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM melalui *Workshop/Bimtek/Seminar/Focus Group Discussion* (FGD) pun telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM Kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap pengelolaan Arsip Dinamis, baik Arsip Konvensional, Arsip Media Baru maupun Arsip Digital (elektronik), khususnya SRIKANDI. Pada Triwulan III, Bagian Arsip telah melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Bimtek Pengolahan Arsip untuk SDM di Bagian Arsip yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Agustus 2025;
- FGD Kebijakan Pengelolaan Arsip Elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025;
- FGD Strategi Optimalisasi Alihmedia yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2025;
- FGD Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025;
- Sosialisasi Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025;
- Kegiatan Kunjungan Lapangan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 10 – 12 September 2025 dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Kearsipan; dan
- Kegiatan Kunjungan Lapangan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Malang pada tanggal 24 – 25 September 2025 dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Tata Kelola Arsip Elektronik.

Kemudian, rencana aksi Sosialisasi SRIKANDI telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. Dengan mengundang para Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun fokus dari sosialisasi SRIKANDI adalah untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan aplikasi SRIKANDI. Bersamaan dengan itu, rencana aksi Digitalisasi Kaset Fit dan *Proper Test* pun telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/8eNoDdP52f5KTS2>

12. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Indeks Pembangunan Statistik

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Badan Pusat Statistik	2,57	2,59	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan Reviu dan Evaluasi Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia	Laporan Reviu dan Evaluasi Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia	1	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan Reviu dan Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Satu Data DPR RI	Laporan Reviu dan Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Satu Data DPR RI	1	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan Reviu dan Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Satu Data DPR RI	Laporan Reviu dan Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Satu Data DPR RI	1	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembuatan Dokumen Pemetaan dan Relevansi Data	Dokumen Pemetaan dan Relevansi Data	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Publikasi Data Statistik Sektoral di Portal Satu Data DPR RI	Tersedianya Hasil Kegiatan Statistik di Portal Satu Data DPR RI	-	-	3	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral kepada BPS	Kegiatan Statistik yang akan dinilai telah mendapatkan rekomendasi dari BPS	2	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan Akuisisi Talenta Jabatan Fungsional Statistis	Dokumentasi atau Laporan Kegiatan Akuisisi Talenta Jabatan Fungsional Statistisi	-	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi Melakukan Reviu dan Evaluasi Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia telah terlaksana. Melalui rapat yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi pada tanggal 14 Juli 2025, seluruh peserta rapat, termasuk perwakilan dari PPID, PKORB, serta Tim Teknis

Pranata Komputer, dibahas penyelarasan klasifikasi data antara kategori Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan internal dan standar keterbukaan informasi publik, serta untuk menghindari kesalahan persepsi dalam pengelolaan dan publikasi data.

Hasil revidu menunjukkan bahwa sebanyak 15 (lima belas) data telah berhasil diklasifikasikan secara bersama-sama dan diusulkan menjadi bagian dari DIP yang siap diunggah ke Portal Satu Data Indonesia. Evaluasi juga menekankan pentingnya keamanan dan selektivitas data, di mana hanya informasi yang telah melalui proses kurasi dan penyaringan yang dapat dipublikasikan, sementara dokumen yang bersifat rahasia atau belum mendapat persetujuan pejabat berwenang tetap dijaga kerahasiaannya. Melalui kegiatan ini, penerapan prinsip Satu Data Indonesia tidak hanya difokuskan pada aspek teknis unggah data, tetapi juga pada peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan integritas data di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selanjutnya, rencana aksi Pembuatan Dokumen Pemetaan dan Relevansi Data pun telah terlaksana. Rencana kegiatan pembuatan dokumen pemetaan dan relevansi data berawal dari pelaksanaan Workshop Gotong Royong Data (WGRD) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia–Bappenas pada tanggal 13 Agustus 2025. Dalam forum pra-penyepakatan tersebut, dibahas sinkronisasi perencanaan data prioritas nasional untuk periode RPJMN 2025–2029, termasuk pembahasan mengenai kebutuhan metadata, produsen data tunggal, serta keterhubungan antarinstansi. Pada kesempatan ini, Sekretariat Jenderal DPR RI turut berpartisipasi dengan memberikan konfirmasi terhadap data yang menjadi domain lembaga legislatif, khususnya terkait data jumlah Anggota DPR RI berdasarkan jenis kelamin. Forum ini menjadi dasar awal penyelarasan antarinstansi dalam menentukan relevansi data yang akan masuk ke dalam Rencana Induk Data Prioritas (Renduk DP) dan menjadi titik awal pemetaan data sektoral DPR RI agar selaras dengan sistem nasional Satu Data Indonesia (SDI).

Menindaklanjuti hasil koordinasi nasional tersebut, Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Usulan Daftar Data dan Data Prioritas pada 1 Agustus 2025 di Ruang Rapat Pusat Teknologi Informasi. Rapat ini bertujuan untuk memverifikasi dan memetakan 162 (seratus enam puluh dua) data yang diminta ke Kementerian/Lembaga melalui SDI, dimana sebagian besar merupakan data indikator dari Rencana Strategis DPR RI. Dalam pembahasan ini, dibahas pula aspek integrasi dengan data.dpr.go.id, pengelolaan metadata, validasi status data, serta rencana pengembangan *knowledge management platform* yang akan menjadi wadah untuk penyimpanan dan kurasi hasil pemetaan data. Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa perlu disusun satu dokumen komprehensif yang memetakan keterkaitan antar-data dan indikator, serta mengidentifikasi data *gaps* dan redundansi antarprodusen data.

Tahap berikutnya dilakukan Rapat Koordinasi Berita Acara Forum Satu Data DPR dengan PPH pada tanggal 9 September 2025, yang bertujuan untuk memfinalisasi daftar Data Prioritas Tahun 2025 serta memastikan kesesuaian dengan hasil verifikasi SDI tingkat pusat. Dalam forum ini, disepakati bahwa terdapat 12 (dua belas) data yang masuk kategori prioritas tingkat menengah, yang akan dikonfirmasi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Selain itu, rapat juga menegaskan pentingnya penyusunan dokumen pemetaan dan relevansi data menggunakan Template Satu Data Indonesia, dengan seluruh dataset diperlakukan sebagai aset negara yang wajib melalui mekanisme validasi dan paraf dokumen.

Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut mencapai puncaknya pada 8 Oktober 2025, melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data DPR RI Nomor

227/TI.02/10/2025. Dalam kesepakatan tersebut, DPR RI menetapkan 262 (dua ratus enam puluh dua) data yang dihasilkan dan dikelola di lingkungan DPR RI sebagai bagian dari arsitektur data SPBE dan Satu Data DPR RI. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 (lima belas) data yang ditetapkan sebagai Data Prioritas Jangka Menengah DPR RI, meliputi 3 (tiga) data utama, yaitu Jumlah Anggota DPR RI Perempuan, Laki-laki, dan Total. Hasil kesepakatan ini menjadi dasar bagi kegiatan penyusunan dokumen pemetaan dan relevansi data, yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk melihat keterkaitan antarindikator, mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis data, serta memastikan integrasi penuh dengan sistem nasional Satu Data Indonesia dan Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kemudian, rencana aksi Publikasi Data Statistik Sektoral di Portal Satu Data DPR RI telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya transparansi dan pengelolaan data sektoral di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui kegiatan ini, 2 (dua) dataset sektoral yaitu Jumlah Anggota DPR RI berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan Jumlah Pengaduan Masyarakat ke DPR RI Tahun 2024 telah resmi dipublikasikan pada Portal Satu Data DPR RI. Publikasi ini memperkuat komitmen DPR RI dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia.

Pada Triwulan III, Pusat Teknologi Informasi juga telah melaksanakan rencana aksi Melakukan Akuisisi Talenta Jabatan Fungsional Statistisi yang pada awalnya direncanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan IV. Proses akuisisi jabatan fungsional Statistisi di Sekretariat Jenderal DPR RI telah berhasil dilaksanakan pada bulan September 2025. Proses ini diawali dengan diterbitkannya Surat Nomor B/1057/KP.06/02/2025 kepada BPS RI pada tanggal 26 Februari 2025, perihal Permohonan Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Statistisi di Sekretariat Jenderal DPR RI melalui mekanisme mutasi pindah instansi. Komposisi formasi yang diminta terdiri dari 1 (satu) jabatan Statistisi Ahli Muda dan 1 (satu) satu jabatan Statistisi Ahli Pertama.

Calon pegawai yang akan mengisi kedua formasi tersebut kemudian mengikuti proses *assessment* dan wawancara yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2025, 14 Mei 2025, dan 26 Juni 2025. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2025, Sekretaris Jenderal DPR RI mengeluarkan Surat Nomor B/1338/KP.05.01/7/2025 yang berisi persetujuan mutasi untuk pengisian formasi Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Setelah seluruh dokumen persyaratan mutasi pegawai yang bersangkutan dilengkapi, Biro SDMA Sekretariat Jenderal DPR RI memproses pengajuan dokumen mutasi antarinstansi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, BKN menerbitkan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 00002/KEP/AU/14004/2025 tanggal 14 Agustus 2025, yang menetapkan bahwa pegawai tersebut terhitung mulai tanggal 1 September 2025 dialihkan menjadi PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selanjutnya, Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi pegawai tersebut diterbitkan pada 15 September 2025 melalui Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 3776/SEKJEN/2025, dengan pertimbangan bahwa pegawai bersangkutan sebelumnya tidak bertugas di Jakarta sehingga memerlukan waktu untuk proses perpindahan. Namun demikian, proses akuisisi ini baru berhasil mengisi 1 (satu) formasi jabatan Statistisi Ahli Pertama. Adapun formasi untuk Statistisi Ahli Muda belum dapat diisi karena calon pegawai yang bersangkutan masih harus melaksanakan tanggung jawab sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jakarta Selatan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/4Q3Ax8bYPbm9agk>

13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
LKPP	75,5	80	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan oleh pelaku PBJ	Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala kepada PPK serta Koordinasi & konsultasi dengan mitra terkait Pemanfaatan Sistem Pengadaan	3	3	3	3	Rp. 271.600.000	Telah terlaksana
Penerbitan dokumen pendukung tercapainya skor dari indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Surat Klarifikasi Pagu Pengadaan, Surat Pemberitahuan Penginputan SiRUP Pencatatan SPSE untuk metode pengadaan e-Purchasing, Toko Daring, non e-Tender/non e-Purchasing sesuai RUP, serta pencatatan e-Kontrak	3	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pencapaian skor untuk 6 indikator turunan dari Indikator Pemanfaatan Sistem	Laporan pencapaian skor untuk 6 sub-indikator dari Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	2	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembaharuan rencana aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ pada Aplikasi SIRENAKSI LKPP	Rencana aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ Tahun 2025	1	1	-	1	Rp. 70.815.000	Telah terlaksana
Pemenuhan SDM JF PPBJ dari pengangkatan pertama	Surat Keputusan Pelantikan CPNS 2025 untuk posisi JF PPBJ Ahli Pertama	-	1	-	-	Rp. 29.700.000	Telah terlaksana
Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi	Surat Keputusan Kenaikan Jenjang (promosi) JF PPBJ Ahli Pertama menjadi JF PPBJ Ahli Muda sebelum 31 Oktober 2025	-	-	1	-	Rp. 252.700.000	Belum terlaksana
Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain	Surat Keputusan Perpindahan JF Lainnya Ahli Muda menjadi JF PPBJ Ahli Muda sebelum 31 Oktober 2025	-	-	1	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Pemenuhan persyaratan pengajuan penetapan PKP – BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR RI	Persyaratan yang telah dipenuhi untuk pengajuan penetapan PKP-BJ Proaktif	-	-	5	-	Rp. 263.250.000	Telah terlaksana
Pengajuan penetapan PKP - BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR RI	Surat Pengajuan Penetapan PKP-BJ Proaktif	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku PBJ dan penerbitan dokumen pendukung tercapainya skor dari Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan telah terlaksana. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan. Pada bulan Juli, dilaksanakan kegiatan pendampingan penginputan

updating SiRUP dan pencatatan SPSE Triwulan I dan Triwulan II. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di dalam kantor, oleh Tim LPSE dan LO per PPK.

Selain melaksanakan pendampingan, dalam upaya untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan, Bagian PBJ juga melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang eKatalog versi 6 yang masih terdapat kendala teknis penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, juga kendala migrasi dari paket pekerjaan yang telah dilakukan di eKatalog versi 5 namun harus diselesaikan di eKatalog versi 6. FGD ini dilakukan bersama PPK yang memiliki pekerjaan di eKatalog versi 5 dan versi 6, dengan pendampingan dari LKPP.

Pada bulan September, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem pengadaan untuk Triwulan III, yaitu atas pencatatan SPSE, dan penginputan SiRUP sesuai dengan DIPA revisi terakhir. Hal ini merupakan pekerjaan yang rutin dilaksanakan, sebagai bagian dari rencana aksi untuk mendapatkan skor optimal dari indikator pemanfaatan sistem pengadaan, utamanya di pencatatan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang sebagian besar dilakukan non-transaksional.

Selanjutnya, rencana aksi Pemenuhan persyaratan pengajuan penetapan PKP – BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR RI dan Pengajuan penetapan PKP - BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR RI telah terlaksana. Dilaporkan bahwa UKPBJ DPR RI telah berhasil mencapai Level 3 Proaktif di bulan Februari Tahun 2024. Kemudian berdasarkan ketentuan, 1 (satu) tahun setelah ditetapkan sebagai UKPBJ Level 3 Proaktif, maka UKPBJ dapat mengajukan penilaian untuk menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ). Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh LKPP, jika indikator penilaian atas maturitas UKPBJ telah meningkat menjadi Level 4 Strategis, UKPBJ DPR RI telah menyiapkan 1 (satu) tahapan penilaian antara, yaitu PKP-BJ Proaktif.

Penilaian PKP-BJ Proaktif ini perlu mendapatkan perhatian bersama, karena yang dinilai adalah faktor implementasinya, kesesuaian dengan prosedur, dan kepatuhan atas peraturan. Pada penilaian Level 3 Proaktif, UKPBJ hanya perlu menyiapkan dokumen secara lengkap sesuai dengan yang menjadi persyaratan. Jika sudah melengkapi, maka telah berhak mendapatkan nilai optimal. Namun, pada penilaian lanjutan yaitu PKP-BJ Proaktif, UKPBJ harus mampu menunjukkan bukti dukung bahwa serangkaian peraturan dan prosedur/tata laksana PBJ telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, pada Triwulan III ini telah dilaksanakan pengajuan penilaian PKP-BJ Proaktif ke LKPP. Pengajuan penilaian telah dijawab oleh LKPP berupa surat persetujuan untuk penilaian, dan diawali dengan memberikan revidi maturitas UKPBJ DPR dan catatan untuk dilengkapi atau diperbaiki, termasuk capaian UKPBJ DPR atas 5 indikator utama yang menjadi syarat awal disetujuinya penilaian PKP-BJ Proaktif.

Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Bagian PBJ adalah Rapat Koordinasi dan FGD dengan Direktorat terkait dari LKPP untuk mengurai tahapan yang akan dilaksanakan bersama, mendata kebutuhan bukti dukung per indikator yang harus dilengkapi, dan melakukan Penilaian Mandiri setelah bukti dukung dilengkapi. Beberapa tahapan persiapan ini akan didampingi ahli pengadaan independen dan LKPP, agar penilaian yang dicapai tidak meleset dari target yang diharapkan untuk tahun 2026.

Namun demikian, rencana aksi Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi yang semula direncanakan dapat diisi oleh JF PPBJ jenjang Ahli Pertama sebanyak 2 (dua) orang yang saat ini telah bergabung di Bagian PBJ, tidak dapat dilaksanakan karena belum terpenuhinya syarat minimal nilai yang harus dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang. Hal ini menjadi catatan untuk dapat ditindaklanjuti di tahun 2026. Maka untuk sementara waktu, selama tahun 2025, JF PPBJ yang telah bertugas di Bagian PBJ secara intensif diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai wujud komitmen Bagian PBJ dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya PBJ yang dapat diakui saat pelaksanaan uji kompetensi.

Di samping itu, rencana aksi Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain yang semula direncanakan dapat diajukan dari JF Lainnya jenjang Ahli Muda sebanyak 2 (dua) orang di tahun 2025, juga belum dapat dilaksanakan dengan alasan belum terpenuhinya salah satu kriteria penilaian pada saat uji kompetensi, yaitu pengalaman menjadi kelompok kerja pemilihan (pokja pemilihan) pada kegiatan tender. Sebagai solusinya, kedua orang kandidat ini telah dilibatkan dalam kegiatan tender pekerjaan konsultan pengawas kantin layang dan pekerjaan sidang/konferensi BKSAP. Namun, tetap perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk jenis pekerjaan yang lebih kompleks, sebelum diajukan untuk mengikuti uji kompetensi. Oleh karena itu, pengajuan akan dilakukan di tahun 2026.

Sesuai dengan DIPA Bagian Pengadaan Barang/Jasa TA 2025, jumlah anggaran dalam rangka pemenuhan skor ITKP adalah senilai Rp. 1.472.012.000. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mencapai target rencana aksi pada indikator ITKP selama Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ypXDNBHxqjQgqdY>

14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:

a. Opini BPK

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
BPK	3	5	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penagihan TLHP BPK	Penyelesaian TLHP BPK	2	-	-	-	Rp. 14.820.000	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal	Berita Acara Rekonsiliasi	3	3	3	3	Rp. 362.741.000	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal	Berita Acara Rekonsiliasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Benchmarking terkait akun signifikan PIPK	Laporan Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 200.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Sosialisasi Penyusunan Risk Register Tabel A PIPK	Penetapan Risk Register Tabel A PIPK	1	-	-	-	Rp. 160.440.360	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penilaian PIPK (PITE, PUTIK, Proses/Transaksi)	Laporan PIPK	1	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal telah terlaksana. Pada tanggal 21-22 Juli 2025, Biro Keuangan melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I TA 2025 di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta – Diponegoro. Kegiatan rekonsiliasi ini diselenggarakan mengundang PT TASPEN untuk mengadakan Rekonsiliasi Rutin setiap Semester. Kegiatan Rekonsiliasi ini juga mengundang Bagian Perencanaan dalam penyusunan Laporan Capaian Output. Kegiatan ini untuk memastikan kesesuaian data transaksi dan saldo Semester I TA 2025 antar-modul di SAKTI (Komitmen, Pembayaran, Persediaan, Aset Tetap/BMN, Piutang). Hasil dari kegiatan ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Semester I beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekaligus memperkuat pengendalian intern dan kepatuhan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.



Gambar 1.4 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I TA 2025

Selanjutnya, rencana aksi Penyusunan Laporan Keuangan pun telah terlaksana yang meliputi beberapa kegiatan seperti pengumpulan, klarifikasi, dan pengiriman data keuangan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan baik internal (unit teknis) maupun eksternal (BPK, Itjen, dan DJPb). Data yang diminta antara lain meliputi rincian akun, bukti transaksi, kontrak, dan data pendukung lainnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2025.

Kemudian, rencana aksi Penilaian PIPK (PITE, PUTIK, Proses/Transaksi) telah dilaksanakan secara bertahap terhadap 3 (tiga) Akun Signifikan yaitu Aset Tak Berwujud, Belanja Perjalanan Dinas dan Penerimaan Sewa Gedung dan Bangunan. Pada 30 September – 1 Oktober 2025, Tim Penilai PIPK mengadakan Penilaian Khusus Akun Signifikan Penerimaan Sewa Gedung dan Bangunan di Wisma Kopo. Kegiatan ini didampingi oleh Bagian Pengelolaan Wisma, dan dalam penilaiannya dilakukan wawancara serta observasi baik ke Tim yang berada di Wisma Kopo, Pihak Ketiga, dan Bagian Pengelolaan Wisma DPR.



Gambar 1.5 Penilaian PIPK di Wisma Kopo

Sesuai dengan DIPA Biro Keuangan TA 2025, jumlah anggaran untuk Upaya pemenuhan Opini WTP dari BPK adalah sebesar Rp. 738.001.360,-. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pencapaian rencana aksi indikator Opini BPK sepanjang tahun 2025.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/m2tNLtLpfqCHNDC>

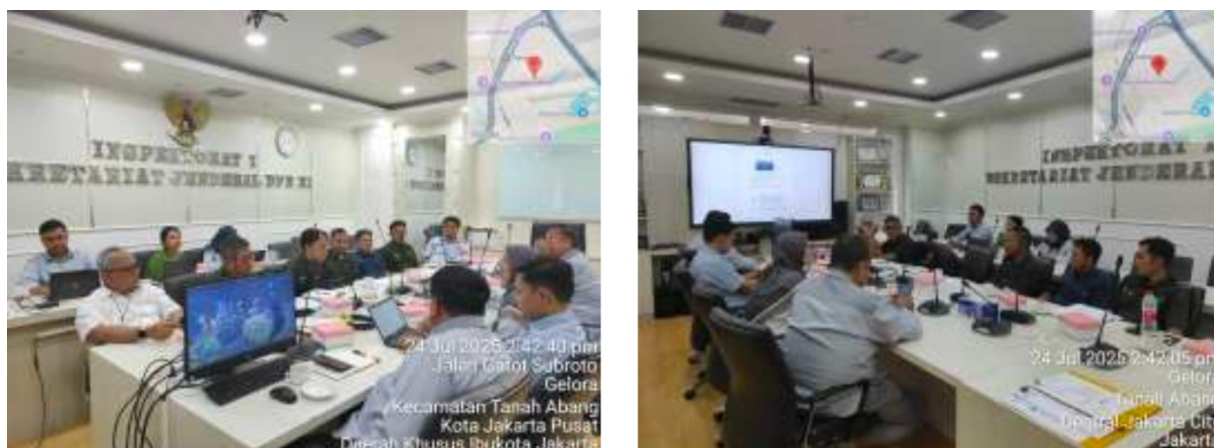
b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
BPK	88,24%	95%	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Surat Keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Negara	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Jumlah Kegiatan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil	1	1	1	1	Rp. 50.050.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Pemeriksaan BPK						

Rencana aksi Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama melalui beberapa Rapat Koordinasi dengan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, Biro Umum, dan Biro Keuangan. Pada pemantauan Semester I 2025, masih terdapat 12 (dua belas) temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, 6 (enam) temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Biro Umum, dan 18 (delapan belas) temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Biro Keuangan.



Gambar 1.6 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Hingga saat ini, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2025 belum terbit dikarenakan adanya keterlambatan dari Tim Pemantauan BPK RI. Berdasarkan hasil Rapat *Exit Meeting* Pemantauan TLHP BPK Semester I 2025 dengan Tim Pemantauan BPK RI, nilai persentase yang dicapai sebesar 96,38% dengan jumlah kerugian negara yang belum dikembalikan ke negara sebesar Rp. 2.722.534.285 dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 24 (dua puluh empat) rekomendasi. Namun, persentase tersebut belum final dan masih menunggu Laporan dari BPK RI.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap 24 (dua puluh empat) rekomendasi yang tersisa menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Utama sebagai coordinator, antara lain, terdapat pemahaman yang kurang mendalam di unit kerja terhadap substansi rekomendasi, pergantian pejabat yang menyebabkan terputusnya informasi, rekomendasi yang membutuhkan koordinasi lintas instansi yang membutuhkan penganggaran khusus, serta banyaknya temuan – temuan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun dimana perusahaan maupun pihak-pihak yang terlibat sudah tidak dapat ditelusuri.

Sesuai dengan DIPA Inspektorat Utama TA 2025, jumlah anggaran untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah senilai Rp. 50.050.000. Jumlah

anggaran tersebut digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI selama Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/D7FAbFXezi7d4tM>

c. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	90,24	91	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Revisi DIPA	Rekapitulasi Data Revisi Kewenangan Kanwil/DJA	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Deviasi Halaman III DIPA	Rekapitulasi Data Pemutakhiran RDP Per Triwulan	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyerapan Anggaran	Rekapitulasi Data Pengelolaan Penyerapan Anggaran	1	1	1	1	Rp. 302.744.690	Telah terlaksana
Belanja Kontraktual	Rekapitulasi Data Percepatan Pendaftaran dan Pertanggungjawaban Kontrak	-	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyelesaian Tagihan	Rekapitulasi Data Pengelolaan Penyelesaian Tagihan	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pengelolaan UP/TUP dan KKP	Rekapitulasi Data Pengelolaan UP/TUP serta Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah	-	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Dispensasi SPM	Rekapitulasi Data Minimalisasi Tagihan yang Telat Diselesaikan	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Capaian Output	Rekapitulasi Data Pengelolaan Capaian Output	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi Revisi DIPA telah dilaksanakan. Penilaian Revisi DIPA oleh Bagian Perencanaan dilakukan rekapitulasi tiap bulan dan diunggah ke dalam Aplikasi Digitall Modul IKPA oleh Bagian Administrasi Keuangan. Kemudian rencana aksi Pemutakhiran RDP Per Triwulan pun telah dilaksanakan. Sehubungan dengan hal ini, Biro Keuangan menyediakan Tim LO (*Liaison Officer*) terkait IKPA yang mendampingi unit kerja dalam pengisian RPD dan Pengelolaan Anggaran di masing-masing unit kerja. Pada tanggal 29 September 2025, dilakukan pendampingan pengisian RPD di Ruang Abdul Muis. Kegiatan ini dihadiri Operator Unit Kerja, PPK dan Staf PPK.

Selanjutnya, Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi bekerjasama untuk mengelola IKPA terkait Indikator Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan dan Capaian Output berupa koordinasi bersama unit kerja secara rutin, koordinasi bersama KPPN Jakarta VII dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam rangka sinkronisasi data dari Aplikasi Eksternal (SAKTI) ke Aplikasi Internal (Modul IKPA) rencana aksi Penyerapan Anggaran. Dengan demikian, rencana aksi Penyerapan Anggaran dan Penyelesaian Tagihan pada Triwulan III telah terlaksana.

Kemudian rencana aksi Pengelolaan UP/TUP dan KKP telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan melalui aplikasi DigitAll. Dalam rangka pengelolaan Pengelolaan UP dan TUP serta Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah, Biro Keuangan mengembangkan Modul Uang Muka DigitAll untuk mempermudah unit kerja dalam pengajuan Uang Muka serta membantu Tim Bendahara dalam pengelolaan kas UP dan TUP. Selain itu, Biro Keuangan juga aktif mengelola terkait KKP agar sesuai ketentuan dan memenuhi target dalam Pencapaian Nilai IKPA.

Rencana aksi Capaian Output juga telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan yang berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi. Setiap bulan, Operator Capaian

Output akan mengumumkan *reminder* pengisian bagi Pelaporan Capaian *Output* per unit kerja. Hasil pengisian oleh unit kerja tersebut kemudian diunggah oleh Operator Capaian *Output* ke dalam aplikasi SAKTI. Bersamaan dengan itu, rencana aksi lainnya pada Triwulan III, seperti Belanja Kontraktual, dan Dispensasi SPM pun telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan secara tepat waktu.

Sesuai dengan DIPA Biro Keuangan TA 2025, jumlah anggaran untuk pencapaian Nilai IKPA adalah sebesar Rp. 302.744.690,- Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pencapaian rencana aksi sepanjang tahun 2025.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aNMDDkeFRTxpdCb>

d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	3,9	3,9	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK LKPP BMN	Kegiatan Rekonsiliasi dengan Unit Kerja Pemilik Temuan dan Kementerian Keuangan	-	-	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Monitoring Capaian Realisasi PNPB yang berasal dari Pengelolaan BMN	Kegiatan Rekonsiliasi PNPB	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyampaian Laporan kepada Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan RKBMN T+2; Laporan Barang Pengguna; Laporan Pengawasan dan Pengendalian 	3	-	2	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengajuan asuransi untuk objek BMN	Polis Asuransi terhadap BMN di	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2019	berupa Gedung dan Bangunan DPR RI						
Monitoring terhadap Persetujuan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	Kegiatan Rekonsiliasi Internal antara Tindak Lanjut Pengelolaan BMN dengan Aplikasi SIMANv2	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Monitoring : <ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan BMN Rusak Berat; • Penetapan Status Penggunaan; • SBSK Gedung dan Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penghapusan BMN Rusak Berat; • Usulan PSP; • Pengajuan SBSK 	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Peningkatan Kapasitas SDM	Kegiatan Bimtek/Workshop/Paket Meeting Pengelolaan BMN dengan Partisipasi SDM minimal 50% serta peningkatan pemahaman melalui selisih nilai pre-test dan post-test $\geq 20\%$	2	-	-	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK LKPP BMN telah terlaksana. Kegiatan ini bertujuan menilai kepatuhan dan efektivitas Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan temuan audit BPK terkait pengelolaan BMN, melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan (DJKN dan DJPb), dan melaporkan status tindak lanjut secara akuntabel dan terdokumentasi. Dalam hal ini, dilaporkan bahwa temuan BPK LKPP s/d tahun 2023 telah seluruhnya ditindaklanjuti pada Semester II Tahun 2024. Kemudian, berkaitan dengan temuan LKPP terhadap Laporan Keuangan T.A 2024, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN meginformasikan bahwa DPR RI tidak memiliki temuan.

Selanjutnya, rencana aksi Monitoring Capaian Realisasi PNBPN yang berasal dari Pengelolaan BMN telah dilaksanakan setiap bulannya sejak bulan Juli hingga September 2025 antara Biro Keuangan dengan DJA, serta antara Biro Keuangan dengan Bagian Wisma sebagai pelaksana pemanfaatan sewa untuk Wisma Griya Sabha Kopo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai sejauh mana Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan dan optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan aset, seperti sewa BMN, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG), penjualan aset yang tidak dipakai (non-produktif), penetapan status penggunaan untuk disewakan atau dimanfaatkan secara ekonomi.

Kemudian rencana aksi Penyampaian Laporan kepada Kementerian Keuangan telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan kepada Direktorat PKKN (Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) – Kementerian Keuangan. Laporan yang disampaikan meliputi Laporan Barang Pengguna Periode Semester I TA 2025 dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Periode Semester I TA 2025.

Rencana aksi Monitoring terhadap Persetujuan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN pun telah dilaksanakan melalui aplikasi SIMAN V2, dan dipastikan seluruh persetujuan atas usulan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai sejauh mana Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap permohonan persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan), tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (DJKN), dan ketepatan pelaksanaan sesuai ketentuan dan *output* yang direncanakan.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi Monitoring Penghapusan BMN Rusak Berat, Penetapan Status Penggunaan, dan SBSK Gedung dan Bangunan telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan terhadap Kementerian Keuangan sebagai bagian dari proses administrasi yang diperlukan dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Laporan Triwulanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi rusak berat atau tidak bernilai guna dihapus dari daftar BMN sesuai mekanisme dan tidak mengganggu efisiensi operasional, menjamin bahwa semua BMN yang digunakan instansi telah memiliki legalitas penggunaan yang sah melalui PSP dari Kementerian Keuangan, dan menilai kesesuaian pengadaan dan pemanfaatan BMN dengan Standar Barang (SB) dan Standar Kebutuhan (SK) yang ditetapkan.

Jumlah anggaran yang direncanakan untuk memastikan ketercapaian IPA adalah senilai Rp.200.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan selama satu tahun anggaran.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/TcYdo3JqLzi9CLr>

15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
KASN	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyempurnaan Sisten dan Fitur SIMATA	Dokumen Penyempurnaan dan Penambahan Fitur SIMATA	-	-	-	1	Rp. 2.320.666.500	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Membuat Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	-	-	-	1	Rp. 33.372.500	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	-	-	-	1	Rp. 150.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu	Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu	-	-	-	1	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pembaharuan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 150.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada indikator kegiatan Indeks Sistem Merit, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan III.

16. Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	77,23%	77,23%	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyelenggaraan Kuis BerAKHLAK di Portal Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI	Kegiatan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 20.000.000	Telah terlaksana
Pemberian Penghargaan Pemenang Kuis BerAKHLAK	Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 8.000.000	Telah terlaksana
Internalisasi BerAKHLAK melalui materi “ASN Profesional BerAKHLAK Mendukung/Menuju Parlemen Modern” pada Agenda Pengembangan Kompetensi untuk Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusbangkom	Pelaksanaan Pemberian Materi pada Agenda Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	1	Rp. 36.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyelenggaraan Seminar dan/atau Webinar Series BerAKHLAK	Pelaksanaan Kegiatan Seminar dan/atau Webinar Series BerAKHLAK	-	-	-	1	Rp. 438.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyelenggaraan Podcast BerAKHLAK	Pelaksanaan Kegiatan Podcast BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 84.600.000	Telah terlaksana
Sosialisasi Nilai BerAKHLAK melalui Media Cetak, Digital dan Sosial	Pemasangan Roll Baner BerAKHLAK di seluruh pintu Gedung DPR RI; Sosialisasi BerAKHLAK melalui Webinar Series BerAKHLAK; Kuis BerAKHLAK di Aplikasi SIRAJIN; Sosialisasi Nilai BerAKHLAK melalui Video Podcast BerAKHLAK di LMS AKILA	-	-	1	-	Rp. 5.500.000	Telah terlaksana

Rencana aksi Penyelenggaraan Kuis BerAKHLAK di Portal Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI telah terlaksana. Dalam hal ini, telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Pusat Teknologi Informasi untuk penayangan di Portal Pegawai dan saat ini Kuis BerAKHLAK sedang berlangsung di Portal Pegawai. Kemudian rencana aksi Pemberian Penghargaan Pemenang Kuis BerAKHLAK juga telah dilaksanakan dan telah diumumkan 10 (sepuluh) nama pemenang Kuis BerAKHLAK di Portal Pegawai.

Selanjutnya, berkaitan dengan rencana aksi Penyelenggaraan Podcast BerAKHLAK telah dilaksanakan proses perekaman video, dan sedang dengan proses *editing* video. bersamaan dengan itu, rencana aksi Sosialisasi Nilai BerAKHLAK melalui Media Cetak, Digital dan Sosial telah dilaksanakan oleh Pusbangkom SDM Legislatif. Selain itu, pemasangan *roll banner* BerAKHLAK telah dilakukan di beberapa titik strategis dan juga ditayangkan melalui videotron.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/aN7mSywBSiyWPWJ>

17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:
a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	93,45	93,75	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembentukan Tim Inti Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017	Surat Tugas	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Reviu Layanan dan Kuesioner Tindak Lanjut Masukan dari unit kerja Eselon II terkait	Penyesuaian Layanan dan Kuesioner dalam Pedoman	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang Terintegrasi	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 224/SEKJEN/2025	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembentukan PIC Pelaksana SKM di semua unit kerja Eselon II Kesenjangan	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 93/SEKJEN/2025	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengisian Kuesioner SKM untuk responden pengguna layanan selain Anggota DPR RI	Kuesioner, Barcode & Link	-	22	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pengolahan Data Triwulan I dan II untuk kebutuhan ZI	Laporan Survei ZI terhadap 8 (delapan) unit kerja sesuai Penetapan SK Sekretaris Jenderal DPR RI	-	8	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengisian kuesioner survei untuk responden yang merupakan Anggota DPR RI sebagai pejabat negara	Kuesioner terisi dari 13 Komisi @25 <i>hardcopy</i>	-	-	325	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Pengolahan Data dan Analisis Hasil Survei	Laporan SKM per unit Eselon I dan II	-	-	-	25	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pelaporan Capaian RB General Indeks SKM untuk Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025	Laporan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pengisian kuesioner survei untuk responden yang merupakan Anggota DPR RI sebagai pejabat negara belum terlaksana. Dari total target 325 kuesioner yang harus terisi, hanya sebanyak 316 kuesioner yang telah terisi hingga Triwulan III. Kegiatan ini penting dilakukan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan dilaksanakan secara periodik dan konsisten—bukan hanya sebagai kewajiban tahunan—melainkan sebagai siklus evaluasi-perbaikan yang terus menerus. Tujuan akhir atas rencana aksi ini adalah menjadikan umpan balik dari pengguna layanan sebagai fondasi utama untuk identifikasi kelemahan, perumusan strategi peningkatan layanan, serta peningkatan akuntabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI secara keseluruhan. Untuk itu, diharapkan target dapat tercapai pada Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/C4XJnqKHpn22a9C>

b. Indeks Pelayanan Publik

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4,74	4,74	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penentuan Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan PEKPPP Nasional	Dokumen Penetapan ULE dan Jadwal PEKPPP Nasional	-	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembentukan Tim PEKPPP	SK Tim Pendampingan PEKPPP Tahun 2025	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP Mandiri Instansional 2025	Undangan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim dalam Persiapan PEKPPP Nasional dan Mandiri Instansional Tahun 2025	-	1	1	-	Rp. 8.910.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI	Dokumen Pelaksanaan Lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Internal Tahun 2025	-	1	1	-	Rp. 21.875.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional oleh Kementerian PANRB	Dokumen Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada ULE	-	1	-	-	Rp. 19.000.000	Telah terlaksana

	di Lingkup Nasional						
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap ULE	Laporan Hasil SKM ULE Tahun 2025	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pelaksanaan PEKPPP Nasional dan Mandiri Intansional	Laporan Pelaksanaan PEKPPP Nasional dan Mandiri Intansional	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Dokumen Pelaksanaan Forum Konsultasi Puiblik (FKP)	-	-	-	1	Rp. 32.325.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pengembangan Mall Pelayanan Publik - Terpadu Satu Pintu Digital	Dokumen Pengembangan Aplikasi Platform CAKRAWALA (Citra, Aspirasi, Keterbukaan, dan Wawasan Parlemen)	-	-	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemantauan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N LAPOR pada ULE	Laporan Pemantauan dan Tindak Lanjut SP4N LAPOR	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Penentuan Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional, Pembentukan Tim PEKPPP Mandiri Instansional, dan Rapat Kerja Persiapan PEKPPP Mandiri Instansional 2025 telah dilaksanakan. Selanjutnya, Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Internal Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah terlaksana. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3639/SEKJEN/2025 yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2025, ditetapkan pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Internal Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. SIRIH (Sistem Informasi Risalah) oleh Biro Persidangan I sebagai Juara I;
2. SITANGGUH oleh Biro Keuangan sebagai Juara II; dan
3. *Regulatory Sandbox* oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan HAM sebagai Juara III.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JJJtwJdHRpXfamo>

LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TRIWULAN III TAHUN 2025

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi dalam *Road Map* RB 2020–2024 setelah dilakukan penajaman dan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. RB Tematik pada dasarnya merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas Pembangunan Nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan RB yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, hingga saat ini belum diterbitkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 maupun *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional terbaru. Sebagai langkah transisi, Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi sementara bagi seluruh instansi pemerintah. Surat Edaran tersebut memperkenalkan 4 (empat) tema baru Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu Hilirisasi, Ketahanan Pangan Nasional, Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan Peningkatan Akses, Kualitas dan Layanan Pendidikan. Disampaikan pula bahwa 4 (empat) tema baru tersebut tidak akan dilakukan penilaian pada tahun 2025, melainkan hanya dilakukan *reviu* rencana aksi. Sedangkan dari 5 (lima) tema pada tahun 2024, hanya Pengentasan Kemiskinan dan Realisasi Investasi saja yang akan dilakukan penilaian pada tahun 2025. Sehingga, kini RB Tematik terdiri dari 6 (enam) tema. Dengan adanya arah kebijakan sementara ini, Sekretariat Jenderal DPR RI menyesuaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar tetap selaras dengan kebijakan nasional sembari menunggu penetapan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang baru.

Namun pada dasarnya, Sasaran dan Indikator pelaksanaan RB Tematik disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam melaksanakan intervensi atas tema yang diusung pada tahun ini, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan sebagai sistem pendukung DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* kepada DPR RI sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan dapat mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon I (Pusat) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam 6 (enam) tema RB diharapkan akan tercapai.

Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan III Tahun 2025.

A. PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Pengentasan Kemiskinan

Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan, diperlukan dukungan kedewanan di bidang administrasi, persidangan, dan keahlian melalui penyediaan data serta informasi yang akurat dan terintegrasi berbasis sistem informasi. Dukungan ini berperan penting dalam menunjang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indikator dari sasaran tersebut adalah Jumlah AKD yang memanfaatkan NA dan RUU, kajian, data, risalah, dan dokumen penunjang lainnya pada repository digital dalam percepatan pengentasan kemiskinan, dengan target 4 (empat) Alat Kelengkapan Dewan yang mengakses.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola Repository Digital	Terbentuknya Tim Pengelola Repository Digital	1	-	-	-	Rp. 750.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan Repository Digital	Tersusunnya Dokumen SOP	1	-	-	-	Rp. 1.125.000	Perencanaan	Telah terlaksana
Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Pengentasan	Tersusunnya NA dan RUU, serta Kajian dan dokumen	-	3	3	2	Rp. 45.500.000	Inovasi	Telah terlaksana

Kemiskinan	pendukung lainnya							
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>Repository Digital</i>	Terinventarisasinya dokumen pendukung lainnya	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Terlaksananya monitoring	-	-	-	1	Rp. 1.125.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mengidentifikasi risalah rapat AKD terkait isu Pengentasan Kemiskinan	Teridentifikasi risalah rapat yang memuat hasil kajian	-	-	-	2	Rp. 750.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Pengentasan Kemiskinan telah terlaksana dengan telah masuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam daftar Progam Legislasi Nasional. Pada tanggal 16 September 2025, Komisi IV DPR RI pun telah menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Keahlian DPR RI untuk membahas NA dan Draft RUU Pangan.

Selanjutnya, rencana aksi Input data dan dokumen secara berkala pada Repository Digital juga telah terlaksana. Sebanyak 11 (sebelas) dokumen kajian terkait pengentasan kemiskinan pada Triwulan III telah diinventarisasi dan diinput ke dalam aplikasi SIMFONI. Hasil kajian tersebut pun telah dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Rapat-rapat di AKD, baik rapat yang bersifat tertutup maupun terbuka. Kemudian telah diinventarisasi pula sebanyak 7 (tujuh) risalah rapat yang terkait pengentasan kemiskinan.

Selama Triwulan III, dilaporkan bahwa konten Info Singkat Pusat Analisis Keparlemenan mencatat total 1.315 kali tayang (views), jangkauan 968 akun (reach), dan 91 interaksi (likes, komentar, dan bagikan). Dua konten dengan performa terbaik pada isu pengentasan kemiskinan adalah: “Penyempurnaan Bantuan Subsidi Upah bagi Pekerja” (Komisi IX) – memperoleh 155 views, 119 reach, dan 9 likes; dan “Penyediaan Perumahan MBR melalui KUR Perumahan: Tantangan dan Peluang Kebijakan” (Komisi V) – meraih 108 views, 73 reach, dan 10 likes.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/TsHjwqrkn5nRKAc>

2. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mendukung peningkatan investasi, diperlukan dukungan kedewanan dalam bidang administrasi, persidangan, dan keahlian, berupa penyediaan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi berbasis sistem informasi dalam menunjang fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya peningkatan investasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait peningkatan investasi.

Indikator dari sasaran tersebut adalah Jumlah AKD yang memanfaatkan NA dan RUU, kajian, data, risalah, dan dokumen penunjang lainnya pada repository digital dalam percepatan peningkatan investasi, dengan target 4 (empat) Alat Kelengkapan Dewan yang mengakses.

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Investasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola Repository Digital	Terbentuknya Tim Pengelola Repository Digital	1	-	-	-	Rp. 750.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan Repository Digital	Tersusunnya SOP	1	-	-	-	Rp. 1.125.000	Perencanaan	Telah terlaksana
Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Peningkatan Investasi	Tersusunnya NA dan RUU, serta Kajian dan dokumen pendukung lainnya	-	3	3	2	Rp. 45.500.000	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada Repository Digital	Terinventarisasinya dokumen pendukung lainnya	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana

Monitoring Pemanfaatan Sistem	Terlaksananya monitoring	-	-	-	1	Rp. 1.125.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mengidentifikasi risalah rapat AKD terkait isu Peningkatan Investasi	Teridentifikasi risalah rapat yang memuat hasil kajian	-	-	-	2	Rp. 750.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Peningkatan Investasi telah terlaksana. Bersamaan dengan itu, rencana aksi Input data dan dokumen secara berkala pada *Repository Digital* pun telah terlaksana. Sebanyak 9 (Sembilan) dokumen kajian bahan terkait investasi telah dilakukan inventarisasi. Kemudian, sebanyak 6 (enam) dokumen kajian/bahan tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIMFONI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/94oPNEsiH4PZ8Cx>

3. Hilirisasi

Dalam rangka mendukung peningkatan hilirisasi diperlukan peningkatan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian berupa penyediaan data, informasi yang akurat dan terintegrasi berbasis sistem informasi untuk menunjang fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya Hilirisasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait untuk mendorong hilirisasi.

Indikator dari sasaran tersebut adalah Jumlah AKD yang memanfaatkan NA dan RUU, kajian, data, risalah, dan dokumen penunjang lainnya pada repository digital dalam mendukung peningkatan hilirisasi, dengan target 4 (empat) Alat Kelengkapan Dewan yang mengakses.

Capaian sasaran dan indikator tema Hilirisasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola	Terbentuknya Tim	-	-	1	-	Rp. 750.000	SDM	Telah terlaksana

Repository Digital	Pengelola Repository Digital							
Penyusunan SOP pada Pengelolaan <i>Repository Digital</i>	Tersusunnya Dokumen SOP	-	-	1	-	Rp. 1.125.000	Perencanaan	Telah terlaksana
Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Peningkatan Hilirisasi	Tersusunnya NA dan RUU, serta Kajian dan dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 45.500.000	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>Repository Digital</i>	Terinventarisasinya dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Terlaksananya monitoring	-	-	-	1	Rp. 1.125.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mengidentifikasi risalah rapat AKD terkait isu Peningkatan Hilirisasi	Teridentifikasinya risalah rapat yang memuat hasil kajian	-	-	-	2	Rp. 750.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada Triwulan III Tahun 2025, tidak terdapat progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema Hilirisasi. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, tema Hilirisasi tidak termasuk dalam tema yang dilakukan penilaian pada tahun 2025. Dengan demikian, kegiatan terkait pelaksanaan maupun pemenuhan data dukung untuk tema Hilirisasi belum dilaksanakan sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari Kementerian PANRB.

4. Ketahanan Pangan Nasional

Dalam rangka mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional, diperlukan dukungan kedewanan di bidang administrasi, persidangan, dan keahlian melalui penyediaan data serta informasi yang akurat dan terintegrasi berbasis sistem informasi. Dukungan ini berperan penting dalam menunjang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, pemerataan distribusi pangan, serta pengelolaan sumber daya pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian dan keamanan pangan nasional.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya Ketahanan Pangan Nasional yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan ketahanan pangan nasional guna memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh masyarakat.

Indikator dari sasaran tersebut adalah Jumlah AKD yang memanfaatkan NA dan RUU, kajian, data, risalah, dan dokumen penunjang lainnya pada repository digital dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, dengan target 4 (empat) Alat Kelengkapan Dewan yang mengakses.

Capaian sasaran dan indikator tema Ketahanan Pangan Nasional Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola Repository Digital	Terbentuknya Tim Pengelola Repository Digital	-	-	1	-	Rp. 750.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan Repository Digital	Tersusunnya Dokumen SOP	-	-	1	-	Rp. 1.125.000	Perencanaan	Telah terlaksana
Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Ketahanan Pangan	Tersusunnya NA dan RUU, serta Kajian dan dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 45.500.000	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada Repository Digital	Terinventarisasinya dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Terlaksananya monitoring	-	-	-	1	Rp. 1.125.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan

								IV
Mengidentifikasi risalah rapat AKD terkait isu Ketahanan Pangan	Teridentifikasi risalah rapat yang memuat hasil kajian	-	-	-	2	Rp. 750.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
RUU Ketahanan Pangan tercantum dalam Program Legislasi Nasional	Tercantumkan RUU Ketahanan Pangan dalam Prolegnas	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada Triwulan III Tahun 2025, tidak terdapat progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema Ketahanan Pangan Nasional. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, tema Ketahanan Pangan Nasional tidak termasuk dalam tema yang dilakukan penilaian pada tahun 2025. Dengan demikian, kegiatan terkait pelaksanaan maupun pemenuhan data dukung untuk tema Ketahanan Pangan Nasional belum dilaksanakan sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari Kementerian PANRB.

5. Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan diperlukan peningkatan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian berupa penyediaan data, informasi yang akurat dan terintegrasi berbasis sistem informasi untuk menunjang fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan nasional. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan.

Indikator dari sasaran tersebut adalah Jumlah AKD yang memanfaatkan NA dan RUU, kajian, data, risalah, dan dokumen penunjang lainnya pada repository digital dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan, dengan target 4 (empat) Alat Kelengkapan Dewan yang mengakses.

Capaian sasaran dan indikator tema Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola Repository Digital	Terbentuknya Tim Pengelola Repository Digital	-	-	1	-	Rp. 750.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan Repository Digital	Tersusunnya Dokumen SOP	-	-	1	-	Rp. 1.125.000	Perencanaan	Telah terlaksana
Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Peningkatan Kualitas Kesehatan	Tersusunnya NA dan RUU, serta Kajian dan dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 45.500.000	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada Repository Digital	Terinventarisasinya dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Terlaksananya monitoring	-	-	-	1	Rp. 1.125.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mengidentifikasi risalah rapat AKD terkait isu Peningkatan Kualitas Kesehatan	Teridentifikasinya risalah rapat yang memuat hasil kajian	-	-	-	2	Rp. 750.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada Triwulan III Tahun 2025, tidak terdapat progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, tema Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan tidak termasuk dalam tema yang dilakukan penilaian pada tahun 2025. Dengan demikian, kegiatan terkait pelaksanaan maupun pemenuhan data dukung untuk tema Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan belum dilaksanakan sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari Kementerian PANRB.

6. Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan diperlukan peningkatan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian berupa penyediaan data, informasi yang akurat dan terintegrasi berbasis sistem informasi untuk menunjang fungsi DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan.

Jumlah AKD yang memanfaatkan NA dan RUU, kajian, data, risalah, dan dokumen penunjang lainnya pada repository digital dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dengan target 4 (empat) Alat Kelengkapan Dewan yang mengakses.

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola Repository Digital	Terbentuknya Tim Pengelola Repository Digital	-	-	1	-	Rp. 750.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan Repository Digital	Tersusunnya Dokumen SOP	-	-	1	-	Rp. 1.125.000	Perencanaan	Telah terlaksana
Penyusunan NA dan RUU, kajian dan/atau dokumen terkait Peningkatan Kualitas Pendidikan	Tersusunnya NA dan RUU, serta Kajian dan dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 45.500.000	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada Repository Digital	Terinventarisasinya dokumen pendukung lainnya	-	-	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana

Monitoring Pemanfaatan Sistem	Terlaksananya monitoring	-	-	-	1	Rp. 1.125.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mengidentifikasi risalah rapat AKD terkait isu Peningkatan Kualitas Pendidikan	Teridentifikasinya risalah rapat yang memuat hasil kajian	-	-	-	2	Rp. 750.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada Triwulan III Tahun 2025, tidak terdapat progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, tema Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan tidak termasuk dalam tema yang dilakukan penilaian pada tahun 2025. Dengan demikian, kegiatan terkait pelaksanaan maupun pemenuhan data dukung untuk tema Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan belum dilaksanakan sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari Kementerian PANRB.

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, ditegaskan bahwa pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan evaluasi internal RB Tahun 2025 dengan mengacu pada Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANB atas pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Tujuan dari Evaluasi Internal *On-Going* ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Aksi RB berjalan sesuai rencana serta telah mengakomodasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan masukan dalam mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan RB, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Evaluasi Internal *On-Going* dilakukan dengan menelaah pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik secara berkelanjutan, guna memperoleh informasi mengenai ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan terhadap target atau tujuan yang telah ditetapkan, pencapaian *output* per triwulan, kualitas manajemen kegiatan, serta kesesuaian waktu pelaksanaan sebagaimana termuat dalam rencana aksi. Evaluasi ini juga mencakup pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB tahun sebelumnya, yaitu perbaikan pelaksanaan RB secara keseluruhan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam pelaksanaan evaluasi internal, Tim Evaluator Internal Sekretariat Jenderal DPR RI juga melibatkan Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) sebagai unit yang berperan dalam pengelolaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI, serta melakukan konfirmasi langsung kepada unit kerja penanggung jawab (PIC) guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan RB.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh Inspektorat Utama melalui Surat Nomor: B/721/PI.03/10/2025 pada tanggal 30 Oktober 2025, berikut catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan III Tahun 2025.

A. KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI (*OUTPUT* DAN WAKTU)

NO	AKSI	CATATAN (<i>OUTPUT</i>)	CATATAN (WAKTU)
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III

	bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN		
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu

	Penilaian Integritas (SPI)		
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	<p>Terdapat 2 dari 6 rencana aksi yang belum dapat dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi: belum dapat dilaksanakan karena belum mencukupi nilai minimal untuk diajukan uji kompetensi kenaikan jenjang di tahun 2025; 2. Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain: belum memenuhi persyaratan pengalaman menjadi kelompok kerja (pokja) pemilihan pada kegiatan tender 	<p>Terdapat 2 dari 6 rencana aksi yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan III, sehingga akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi: belum dapat dilaksanakan karena belum mencukupi nilai minimal untuk diajukan uji kompetensi kenaikan jenjang di tahun 2025; 2. Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain: belum memenuhi persyaratan pengalaman menjadi kelompok kerja (pokja) pemilihan pada kegiatan tender
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu

	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
16.	Indeks Sistem Merit	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III
17.	Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Terdapat 1 dari 9 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya di Triwulan III, yaitu Kuesioner terisi dari 13 Komisi @25 <i>hardcopy</i> (total 325 kuesioner yang harus terisi, namun baru terisi sebanyak 316)	Terdapat 1 dari 9 indikator <i>output</i> yang belum menunjukkan ketepatan waktu dikarenakan belum terlampir data dukung berupa Kuesioner terisi dari 13 Komisi @25 <i>hardcopy</i> (total 325 kuesioner yang harus terisi, namun baru terisi sebanyak 316)
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
21.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator <i>output</i> Triwulan III dilaksanakan tepat waktu
22.	Indeks Kualitas Kebijakan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III
23.	Tingkat Implementasi	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan III

	Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE		
--	---------------------------------------	--	--

B. KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III
3.	Indeks SPBE	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
4.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
7.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya

11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terdapat 2 dari 6 rencana aksi yang belum dapat dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu: 1. Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi: belum dapat dilaksanakan karena belum mencukupi nilai minimal untuk diajukan uji kompetensi kenaikan jenjang di tahun 2025; 2. Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain: belum memenuhi persyaratan pengalaman menjadi kelompok kerja (pokja) pemilihan pada kegiatan tender
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
17.	Indeks Sistem Merit	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III
18.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan: total kuesioner yang ditargetkan terisi sebanyak 325 belum terisi seluruhnya. Kuesioner hanya terisi sebanyak 316 dari target 325. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada PIC, target akan dipenuhi pada Triwulan IV. Berdasarkan keterangan Laporan Progress, kekurangan 9 (sembilan) responden akan

		dilakukan sampai dengan November minggu kedua, menunggu Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025-2026 dibuka kembali pada tanggal 4 November 2025
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
23.	Indeks Kualitas Kebijakan	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya

C. KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III
3.	Indeks SPBE	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
4.	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
7.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III

	Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terdapat 2 dari 6 rencana aksi yang belum dapat dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu: 1. Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi: belum dapat dilaksanakan karena belum mencukupi nilai minimal untuk diajukan uji kompetensi kenaikan jenjang di tahun 2025; 2. Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain: belum memenuhi persyaratan pengalaman menjadi kelompok kerja (pokja) pemilihan pada kegiatan tender
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
17.	Indeks Sistem Merit	Tidak terdapat rencana aksi pada Triwulan III
18.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi sepenuhnya. Terdapat 1 dari 9 rencana aksi yang belum dapat dilaksanakan pada Triwulan III, yaitu: Pengisian kuesioner survei untuk responden yang merupakan Anggota DPR RI sebagai pejabat negara. Kuesioner yang baru terisi hingga Triwulan III sebanyak 316, sedangkan target kuesioner terisi sebanyak 325
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
23.	Indeks Kualitas Kebijakan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi

D. REKOMENDASI EVALUASI RB *ON-GOING* GENERAL TRIWULAN III

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	-
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	-
3.	Indeks SPBE	-
4.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	-
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	-
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	-

7.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	-
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	-
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	-
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	-
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	-
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM calon JF PPBJ agar memenuhi syarat uji kompetensi; 2. Memberikan kesempatan kepada pegawai yang berminat berpindah ke JF PPBJ untuk memperoleh pengalaman sebagai anggota Pokja Pemilihan, sehingga memenuhi syarat perpindahan jabatan
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	-
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	-
17.	Indeks Sistem Merit	-

18.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	-
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Agar dilakukan tindak lanjut untuk memastikan seluruh responden yang ditargetkan mengisi kuesioner hingga mencapai 325 kuesioner terisi, dengan batas waktu paling lambat pada Triwulan IV tahun berjalan
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	-
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	-
23.	Indeks Kualitas Kebijakan	-

E. EVALUASI RB *ON-GOING* TEMATIK TRIWULAN III

NO	AKSI	KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI (<i>OUTPUT</i> DAN WAKTU)	KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB TEMATIK	KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB TEMATIK
1.	Pengentasan Kemiskinan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya dan dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan III	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
2.	Realisasi Investasi	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya dan dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan III	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan III telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan III telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi

3.	Ketahanan Pangan Nasional	Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk 4 (empat) tema tematik terbaru. Rencana aksi ini telah di unggah seluruhnya ke Portal RB Nasional
4.	Hilirisasi	
5.	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	
6.	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	

F. REKOMENDASI EVALUSAI RB *ON-GOING* TEMATIK TRIWULAN III

NO	AKSI	REKOMENDASI
1.	Pengentasan Kemiskinan	-
2.	Realisasi Investasi	-
3.	Ketahanan Pangan Nasional	-
4.	Hilirisasi	-
5.	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	-
6.	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	-

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang optimal secara umum, dengan sebagian besar rencana aksi, baik RB General maupun RB Tematik, terlaksana tepat waktu dan mencapai target output yang ditetapkan. Ketercapaian ini mencerminkan komitmen Setjen DPR RI dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Secara spesifik, keberhasilan utama dicapai pada beberapa Indikator Kegiatan Utama yaitu:

1. **Tata Kelola SPBE:** indikator Indeks SPBE dan Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE tercapai, termasuk penyelesaian Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis BPMN, penambahan layanan TIK pada aplikasi STELA, dan penetapan dua Surat Keputusan penting terkait arsitektur SPBE.
2. **Akuntabilitas Kinerja:** indikator Indeks Perencanaan Pembangunan dan Nilai SAKIP tercapai. Hal ini ditandai dengan penetapan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis DPR RI 2025–2029 dan penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2025–2029.
3. **Hukum dan Peraturan:** rencana aksi Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) terlaksana tepat waktu, termasuk penyelesaian Kertas Kerja Kebijakan PERISAI, SIDILAN, dan AIRA.
4. **Pengelolaan Keuangan dan Aset:** indikator Opini BPK, IKPA, dan Indeks Pengelolaan Aset tercapai, termasuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan Semester I TA 2025 dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang mencapai persentase 96,38% (sementara).
5. **SDM dan Budaya Kerja:** kegiatan internalisasi *Core Value* ASN (BerAKHLAK) melalui kuis dan podcast terlaksana, serta seluruh rencana aksi Indeks Maturitas SPIP tercapai.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat dua Indikator Kegiatan Utama yang menghadapi kendala dan belum mencapai target output pada Triwulan III, yaitu:

1. **Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan):** Dua rencana aksi terkait Pemenuhan SDM Jabatan Fungsional (JF) PPBJ (promosi dan perpindahan jabatan lain) belum dapat dilaksanakan karena calon pegawai belum memenuhi syarat minimal nilai uji kompetensi dan/atau pengalaman menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.
2. **Pelayanan Publik Prima (Survei Kepuasan Masyarakat - SKM):** Target pengisian kuesioner dari Anggota DPR RI sebagai responden (target 325 kuesioner) belum tercapai sepenuhnya, dengan realisasi kuisisioner terisi baru mencapai 316 kuesioner.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Tata Kelola Pengadaan:** Pembinaan SDM, melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi secara intensif kepada calon JF PPBJ agar segera memenuhi nilai minimal dan syarat pengalaman Pokja Pemilihan untuk diajukan uji kompetensi dan kenaikan/perpindahan jenjang pada tahun 2026.
2. **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM):** Pencapaian target agar segera ditindaklanjuti untuk memastikan pengisian 9 (sembilan) kuesioner yang tersisa dari Anggota DPR RI paling lambat pada Triwulan IV tahun berjalan dapat terpenuhi, sejalan dengan dibukanya masa persidangan kembali.

Meskipun dampak menyeluruh (*outcome*) membutuhkan waktu yang lebih panjang, beberapa dampak positif atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun berjalan telah terlihat, antara lain:

1. **Penguatan Dasar Hukum:** Penetapan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2025 telah menyediakan landasan strategis resmi bagi seluruh unit kerja dalam merumuskan kebijakan dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kelembagaan DPR RI periode 2025–2029.
2. **Peningkatan Kualitas Layanan Digital:** Pengembangan aplikasi STELA dan integrasi SPEKTRO+ ke DigitAll memperkuat akuntabilitas pelaporan dan efisiensi *service delivery internal*, selaras dengan prinsip tata kelola SPBE.
3. **Dukungan Fungsi DPR RI:** Konten informasi dan kajian terkait tema RB Tematik seperti Pengentasan Kemiskinan telah dimanfaatkan dan menghasilkan interaksi yang signifikan di kalangan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Setelah output dari rencana aksi dapat terlaksana dengan baik, fokus pelaksanaan RB perlu bergerak dari upaya pemenuhan dokumen menjadi peningkatan kualitas layanan dan peningkatan dampak (*outcome*) yang dapat dirasakan oleh penerima layanan, antara lain:

1. **Pemanfaatan Produk RB Tematik:** Memastikan output RB Tematik (kajian, Info Singkat, Naskah Akademik RUU) benar-benar diserap dan dimanfaatkan oleh Anggota dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Melakukan *feedback loop* dengan AKD untuk mengukur seberapa jauh produk kajian tersebut memengaruhi proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
2. **Penguatan Pengawasan Internal Berbasis Risiko:** Mengintegrasikan hasil audit TIK dan keamanan siber ke dalam *Risk Management Plan* Setkretariat Jenderal DPR RI. Menjadikan audit sebagai dasar perumusan kebijakan pengamanan SPBE dan *Contingency Plan* secara lebih komprehensif.
3. **Internalisasi dan Change Management:** Mengintensifkan sosialisasi dan internalisasi *Core Value* ASN (BerAKHLAK) agar tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi terwujud dalam perubahan budaya kerja nyata yang mendukung *service excellent* dan nilai-nilai integritas.